



**PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

NOMOR 3 TAHUN 2002

TENTANG

**PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
(PROPEDA)
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2001 – 2005**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ,**

- Menimbang : a. bahwa Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Daerah Otonom dan merupakan bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlumemiliki dokumen induk perencanaan pembangunan Daerah yang memberikan arah penyelenggaraan penyelenggaraan pembangunan yang partisipatif, transparan, akuntabel, berkeadilan dan reponsif, yang dituangkan dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pola Dasar Pembangunan Daerah , perlu adanya Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) yang merupakan dokumen perencanaan manajerial komprehensif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2001 – 2005;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 tahun 1959 (Lembaga Negara Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1819);

2. Undang-undang Nomor 24 tahun 1999 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 350)
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang nomor 25 Tahun 1999 tentang Penerimaan dan Pembagian Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3851);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 206)
7. Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
9. Peraturan Pemerintah republik Indonesia nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia nomor 4095);

10. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 11 Seri D Tahun 2001);

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Menetapkan : **MEMUTUSKAN ;**

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA TENTANG PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH (PROPEDA) PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2001 –
2005.**

Pasal 1

Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2001 – 2005 adalah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat pokok-pokok kebijaksanaan dan pokok – pokok program pembangunan daerah yang strategis bagi para pelaku pembangunan dengan agar penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat lebih terpadu, terkoordinir, dan berkesinambungan melalui sistem perencanaan yang menyeluruh , integrative, saling terkait dan sinergis, yang ruang lingkupnya sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Daerah ini .

Pasal 2

Berdasarkan Peraturan Daerah ini , selanjutnya disusun Rencana Strategis (RENSTRA) Daerah dengan Peraturan Daerah , yang setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) yang realisasinya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta .

Pasal 3

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 24 April 2002

**GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,**

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di yogyakarta
Pada tanggal 18 mei 2002

**SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

BAMBANG S PRIYOHADI
NIP. 110021674

**LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA TAHUN 2002 NOMOR 13 SERI E**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2002
TENTANG
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH (PROPEDA)
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2001 - 2005

1. PENJELASAN UMUM

Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Propinsi daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2001 – 2005, merupakan penjabaran dari peraturan Daerah Propinsi daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pola dasar Pembangunan Daerah (POLDAS) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2001 – 2005 yang disusun berdasarkan aspirasi masyarakat kekhususan daerah.

Sesuai dengan arahan POLDAS, Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2001 - 2005 pelaksanaannya diarahkan kepada perwujudan demokratisasi, desentralisasi, transparansi, akuntabilitas publik dan partisipasi aktif dari para pelaku pembangunan yang didasarkan kepada konsep pengembangan wilayah administrasi pemerintahan.

Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Propinsi DIY memuat garis-garis besar arahan program, kondisi, potensi, permasalahan, arah kebijaksanaan Pembangunan daerah dan program-program prioritas pembangunan Propinsi daerah istimewa Yogyakarta dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I	: Pendahuluan
Bab II	: kondisi Daerah, Kendala dan Proyeksi Pertumbuhan
Bab III	: Filosofi, Visi dan misi Pembangunan
Bab IV	: Arah Kebijakan, strategi, Pendekatan , Sasaran dan Peran Pelaku Pembangunan
Bab V	: Program Pembangunan Daerah
Bab VI	: Pembangunan Kawasan dan Pengembangan Wilayah
Bab VII	: Penutup

Agar pelaksanaan program Pembangunan Daerah (PROPEDA) dapat terlaksana dengan baik dan terarah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Program pembangunan Daerah.

Atas Dasar hal tersebut di atas perlu membentuk Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Program Pembangunan Daerah Propinsi (PROPEDA) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2001 - 2005.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas
Pasal 2 Cukup jelas
Pasal 3 Cukup Jelas
Pasal 4 Cukup jelas

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 3 TAHUN 2002
TANGGAL : 24 APRIL 2002

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN	1
LATAR BELAKANG	1
A. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN	2
B. LANDASAN	2
C. RUANG LINGKUP	3
 BAB II KONDISI DAERAH, KENDALA DAN PROYEKSI	
PERTUMUBUHAN	4
A. KONDISI	4
1. Geografis	4
2. Sumberdaya Alam	5
3. Kependudukan	6
4. Perekonomian	7
5. Pendidikan	11
6. Agama dan Sosial Budaya	11
7. Pariwisata	12
8. Pemerintahan	12
9. Politik	13
10. Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban	13
B. KENDALA	13
1. Rendahnya Dayadukung terhadap Pengembangan Perekonomian Wilayah	13
2. Kesenjangan Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi antar Wilayah	14
3. Penurunan Kualitas Lingkungan	14
4. Tata Ruang yang tidak ditepati	14
5. Ketimpangan antara Kesempatan Kerja dengan Angkatan Kerja	15
6. Kawasan Tertinggal dan Kemiskinan	15
7. Penyediaan Tanah untuk Pembangunan	15
8. Ketidakmerataan Latar Belakang Pendidikan Masyarakat	15
9. Ketidaksetaraan <i>Gender</i>	16
10. Rendahnya Kinerja Kelembagaan dan Kemampuan Aparatur Pemerintahan	16
11. Potensi Konflik	16
12. Potensi Bencana Alam	16
C. PROYEK PERTUMBUHAN	17
1. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi	17
2. Indeks Pembangunan Manusia	24

BAB V	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	45
A.	PEWUJUDAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH (GOO GOVERNANCE CLEAN GOVERNMENT)	45
	1. Pelaksanaan Otonomi Daerah	45
	2. Penegakan Supremasi Hukum	46
	3. Pendayagunaan Aparatur Negara dan Pengawasan	47
	4. Pembangunan Politik	47
	5. Pembangunan Ketenteraman dan Ketertiban	48
	6. Komunikasi, Informasi dan Media Massa	48
	7. Penerapan <i>e-Government</i>	49
B.	PEMULIHAN KETAHANAN EKONOMI DAERAH	49
	1. Industri	49
	2. Perdagangan	52
	3. Pariwisata	53
	4. Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan	54
	5. Perikanan dan Kelautan	56
	6. Sumberdaya Air dan Irigasi	57
	7. Pengembangan Usaha Daerah dan Keuangan Daerah	59
	8. Koperasi, usaha Kecil dan Menengah	60
	9. Transportasi	61
	10. Pertambangan	62
	11. Energi	64
	12. Sumberdaya Alam dan Lingkungan	65
C.	PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	67
	1. Pembinaan Kehidupan Beragama	67
	2. Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	68
	3. Pemuda dan Olahraga	69
	4. Kependudukan	70
	5. Keluarga Berencana	71
	6. Tenaga Kerja dan Transmigrasi	73
	7. Peningkatan Peran Perempuan	75
D.	PENINGKATAN KETAHANAN BUADAYA	76
E.	PEWUJUDAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SEBAGAI PUSAT PENDIDIKAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI TERKEMUKA	77
	1. Pendidikan	78
	2. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	78
F.	PENINGKATAN PERAN MASYARAKAT	78

BAB VI	PEMBANGUNAN KAWASAN DAN PENGEMBANGAN	
	WILAYAH	80
	A. PERTANAHAN	81
	B. PENATAAN RUANG	82
	C. PEMBANGUNAN DAERAH	83
	D. PEMBANGUNAN PERKOTAAN	84
	E. PEMBANGUNAN PERMUKIMAN	85
	F. PENGEMBANGAN WILAYAH BARAT	86
	G. PENGEMBANGAN WILAYAH TENGAH	87
	H. PENGEMBANGAN WILAYAH TIMUR	89
	I. PENGEMBANGAN WILAYAH PESISIR	90
BAB VII	P E N U T U P	92

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. LATAR BELAKANG

Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, maju, berdayasaing, demokratis, berkeadilan dan damai dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia dibutuhkan pelaksanaan pembangunan nasional yang lebih mantap dan berkesinambungan.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, propinsi sebagai daerah otonom mempunyai beberapa kewenangan, diantaranya kewenangan perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro. Untuk menjamin pelaksanaan pembangunan daerah yang mantap dan berkesinambungan maka akan diperlukan suatu perencanaan pembangunan daerah yang terpadu, dengan mempertimbangkan kemampuan sumberdaya nasional, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan perkembangan regional dan global.

Selaras dengan hal tersebut, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai daerah otonom maupun sebagai wilayah administrasi perlu memiliki konsep pembangunan daerah dalam jangka panjang yang dituangkan dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah (POLDAS) yang kemudian dijabarkan dalam rencana pembangunan skala waktu lima tahunan yang disebut sebagai Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) yang disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dan kekhususan daerah, serta memuat kebijakan, arahan umum dan prioritas pembangunan daerah dengan tetap mengacu dan berpedoman kepada Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) dalam kerangka pembangunan nasional. Pada dasarnya PROPEDA ini merupakan dokumen perencanaan sebagai acuan bagi para pelaku pembangunan (*stakeholders*) yang terdiri dari pemerintah, masyarakat, pelaku sektor swasta maupun kalangan akademisi, dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan di daerah. Dengan kata lain, PROPEDA merupakan kesepakatan dari para pelaku pembangunan mengenai bagaimana Propinsi DIY akan diarahkan dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Sesuai dengan arahan pada POLDAS, pelaksanaan pembangunan daerah di Propinsi DIY akan diarahkan kepada pewujudan demokratisasi, desentralisasi, transparansi, akuntabilitas publik dan partisipasi aktif dari para pelaku pembangunan yang didasarkan kepada konsep pengembangan wilayah yang tidak dibatasi dengan wilayah administrasi pemerintah. PROPEDA DIY Tahun 2001 – 2005 mencakup seluruh dimensi pembangunan yang memusatkan kepada isu-isu pokok daerah sesuai dengan tugas dan fungsi daerah otonom, namun PROPEDA tersebut tidak tergantung pada masa jabatan Gubernur.

B. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Maksud ditetapkannya PROPEDA adalah sebagai alat kontrol terhadap pelaksanaan pembangunan bagi para *stakeholders* (pemerintah, dunia usaha/swasta dan masyarakat). Di samping itu, sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat pokok-pokok kebijakan dan pokok-pokok program pembangunan daerah yang strategis bagi para pelaku pembangunan.

Sedangkan tujuannya adalah agar penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan di Propinsi DIY dapat lebih terpadu, terkoodinir dan berkesinambungan melalui sistem perencanaan yang serba cakup (*comprehensive*), integratif, saling terkait dan sinergis.

Adapun sasarannya adalah para pelaku pembangunan daerah/*stakeholders* (pemerintah, dunia usaha/swasta dan masyarakat).

C. LANDASAN

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan PROPEDA DIY 2001 – 2002 meliputi :

1. Landasan Idiil : Pancasila;
2. Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar 1945;
3. Landasan Konsepsional Arah Penyelenggaraan Negara : Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999 – 2004;

4. Landasan Kebijakan Operasional : Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS);
5. Landasan Operasional Fungsional :
 - a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;
 - b. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
 - c. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 - d. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - e. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan;
 - j. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2001 – 2005.
 - k. serta peraturan perundangan turutan lainnya.

D. RUANG LINGKUP

PROPEDA DIY 2001 – 2005 memuat garis besar kondisi, potensi, permasalahan, arah kebijakan pembangunan daerah dan program-program pembangunan Propinsi DIY dalam kurun waktu tersebut, dalam rangka membangun kesejahteraan rakyat yang didukung dengan pemberdayaan masyarakat, pemulihan ketahanan ekonomi daerah dan mewujudkan pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*).

Pelaksanaan program-program pembangunan dengan pendekatan sektoral selama ini menimbulkan munculnya ego sektoral, yang berakibat tidak efisiennya hasil pembangunan. Oleh karena itu, akan dipergunakan pendekatan lain yaitu pendekatan wilayah.

Dipilihnya pendekatan kewilayahan dalam PROPEDA ini adalah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 yang menetapkan kewenangan bidang pemerintahan tertentu bagi Pemerintah Propinsi, diantaranya adalah mengenai perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro yang tidak dibatasi oleh batas administrasi pemerintahan. Dengan demikian PROPEDA juga merupakan dokumen yang mengkoordinasikan program-program pembangunan Propinsi DIY.

BAB II

KONDISI DAERAH, KENDALA DAN PROYEKSI PERTUMBUHAN

A. K O N D I S I

Dicantumkan kondisi daerah pada Program Pembangunan Daerah (PROPEDA), adalah untuk memberikan gambaran mengenai kondisi awal pada waktu diberlakukannya PROPEDA Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 2001 – 2005 sebagai patok banding (*bench-mark*) pada saat dilakukan evaluasi pelaksanaan nantinya.

1. Geografis

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berada di bagian tengah selatan Pulau Jawa, secara astronomis terletak pada 7°33' LS – 8°12'LS dan 110°00' BT – 110°50' BT, dengan luas 3.185,80 km².

Secara administratif Propinsi DIY meliputi 1 kota dan 4 kabupaten, 78 kecamatan, 45 kelurahan dan 393 desa. Kota Yogyakarta terdiri dari 14 kecamatan 45 kelurahan, Kabupaten Bantul terdiri dari 17 kecamatan 75 desa, Kabupaten Kulon Progo terdiri dari 12 kecamatan 88 desa, Kabupaten Gunungkidul terdiri dari 18 kecamatan 144 desa, dan Kabupaten Sleman terdiri dari 17 kecamatan 86 desa.

Secara fisiografis dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) satuan wilayah, yaitu :

a. Satuan fisiografi Gunung Api Merapi

Terbentang mulai dari kerucut gunung api hingga dataran fluvial gunung api yang meliputi daerah Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta dan sebagian Kabupaten Bantul termasuk bentang lahan vulkanik. Daerah kerucut dan lereng gunung api merupakan daerah hutan lindung dan sebagai kawasan resapan air daerah bawahan. Satuan wilayah ini terletak pada zone utara di Kabupaten Sleman. Gunung Merapi yang mempunyai karakteristik khusus, menjadi daya tarik untuk dapat dijadikan sebagai obyek studi kegunungapian dan pariwisata. Namun demikian, kawasan ini rawan bencana alam.

b. Satuan Pegunungan Selatan

Terletak di Kabupaten Gunungkidul, atau dikenal sebagai Pegunungan Seribu merupakan wilayah perbukitan batu gamping (*limestone*) yang kritis, tandus dan selalu kekurangan air dengan bagian tengah terdapat dataran (Wonosari *Basin*). Wilayah ini merupakan bentang lahan solusional, dengan bahan batuan induk batu gamping, mempunyai karakteristik lapisan tanahnya dangkal dan vegetasi penutupnya relatif jarang.

c. Satuan Pegunungan Kulon Progo

Terletak di Kabupaten Kulon Progo bagian utara merupakan bentang lahan struktural denudasional dengan topografi berbukit yang mempunyai kendala lereng yang curam dan potensi air tanahnya kecil.

d. Satuan Dataran Rendah

Merupakan bentang lahan fluvial yang didominasi oleh dataran aluvial, membentang di bagian selatan DIY mulai dari Kabupaten Kulon Progo sampai dengan Kabupaten Bantul yang berbatasan dengan Pegunungan Seribu. Wilayah ini merupakan daerah yang subur. Bentang lahan lainnya yang belum didayagunakan secara optimal adalah bentang lahan marin dan eolin yang merupakan satuan wilayah pantai, yang terbentang dari Kulon Progo sampai Bantul. Khusus di Parangtritis Bantul yang terkenal dengan gumuk pasir menjadi laboratorium alam studi geografi.

2. Sumberdaya alam

a. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan secara umum dapat dikelompokkan menjadi lahan sawah seluas 59.729 ha (18,75 %), pekarangan 86.725 ha (27,23 %), tegal 109.432 ha (34,35 %), hutan 17.060 ha (5,36 %) serta pemanfaatan lain-lain 45.571 ha (14,30%).

Salah satu masalah penggunaan lahan adalah makin menurunnya luas lahan pertanian sawah, yaitu seluas ± 330 ha (0,55%) selama lima tahun terakhir (1995 – 1999), karena meningkatnya kebutuhan lahan untuk permukiman dan pembangunan sektor lainnya seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk.

b. Sumberdaya Air

Potensi sumberdaya air yang cukup besar terletak di zona tengah, baik berupa air tanah maupun air permukaan. Besarnya potensi air permukaan ditunjukkan dengan adanya tiga sungai besar yang mengalir di wilayah DIY, yaitu sungai Progo, Opak dan Oyo.

Sedangkan potensi sumberdaya air di zona timur berupa sungai bawah tanah yang banyak dijumpai di Gunungkidul namun belum maksimal pemanfaatannya. Sementara di zona barat terdapat waduk Sermo yang telah dimanfaatkan untuk persediaan air minum dan pertanian.

Keberadaan sumberdaya air tersebut dipengaruhi oleh curah hujan tahunan yang berkisar antara 1.500 mm sampai dengan 2.400 mm. Dengan curah hujan bulanan terkering sebesar 23,20 mm dan terbasah 546 mm. Hari hujan terendah terjadi pada bulan Agustus sebanyak 4 hari, sedangkan hari hujan terbanyak terjadi pada bulan Februari sebanyak 24 hari.

c. Bahan Mineral dan Bahan Galian

Potensi sumberdaya alam yang terbesar adalah bahan galian golongan C, seperti pasir, kerikil, batu, batu gamping, kalsit, kaolin, dan zeolit serta breksi batu apung. Namun demikian, penggunaan yang berlebihan akan merusak lingkungan. Sedangkan bahan galian golongan A berupa batu bara sangat terbatas jumlahnya, begitu pula untuk bahan galian golongan B berupa Pasir Besi (Fe), Mangan (Mn), Barit (Ba) dan Emas (Au) terdapat di kabupaten Kulon Progo dengan jumlah terbatas.

d. Pantai dan Kelautan

Lahan pesisir di Propinsi DIY seluas ± 8.250 Ha yang membujur dari barat sampai ke timur dari kabupaten Kulon Progo, Bantul dan Gunungkidul, berpotensi untuk dikembangkan sebagai lahan pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata. Dari luas lahan di atas, 650 Ha berpotensi untuk dikembangkan sebagai lahan budidaya tambak udang/ikan. Sedangkan potensi perikanan laut di pantai selatan sepanjang 110 km baru dapat dimanfaatkan $\pm 7\%$ per tahun yang dieksploitasi dengan peralatan yang sederhana.

3. Kependudukan

Jumlah penduduk DIY pada tahun 1990 sebanyak 2.912.611 jiwa, dan pada tahun 2000 meningkat menjadi 3.120.478 jiwa. Kepadatan penduduk pada tahun 1990 sebesar 914 jiwa per km², meningkat menjadi 979 jiwa per km² pada tahun 2000. Sedangkan pertumbuhan penduduk tahun 1980 – 1990 sebesar 0,58%, pada tahun 1990 – 2000 meningkat menjadi 0,72% per tahun. Salah satu faktor meningkatnya pertumbuhan penduduk ini adalah berkaitan dengan kondisi DIY sebagai salah satu daerah yang relatif aman dan tenteram, sehingga migrasi masuk lebih besar dari pada migrasi keluar.

Persebaran penduduk desa-kota, menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk kota jauh lebih cepat dari pada pertumbuhan penduduk desa. Tingginya pertumbuhan penduduk kota ini antara lain karena faktor berubahnya status desa menjadi kota dan atau arus urbanisasi penduduk desa ke kota yang cukup tinggi.

Pengaruh dari keberhasilan gerakan keluarga berencana ditandai dengan makin menurunnya penduduk yang berumur 0 - 14 tahun. Sedangkan sebagai cerminan meningkatnya kesejahteraan penduduk, adalah menurunnya angka kematian, meningkatnya usia produktif dan usia harapan hidup.

4. Perekonomian

a. Perkembangan Ekonomi dan Struktur Lapangan Usaha

Perkembangan ekonomi DIY selama 5 tahun terakhir (1994-1999) menunjukkan angka yang relatif rendah yaitu sebesar 1,57 % pertahun. Pertumbuhan ekonomi tahun 1994 sebesar 8,11 %, tahun 1995 sebesar 8,09 %, tahun 1996 sebesar 7,79 %, tahun 1997 sebesar 3,53 %, dan tahun 1998 sebesar -11,28 % serta tahun 1999 sebesar 1,01 %. Untuk tahun 2000 - 2004, diperkirakan akan tumbuh rata-rata 5 % pertahun, dengan catatan inflasi tidak lebih dari 2,51 % dan besarnya investasi pemerintah tidak kurang dari jumlah investasi pada tahun 2000.

Distribusi lapangan usaha dalam pembentukan *Product Domestic Regional Bruto* (PDRB) Propinsi DIY pada tahun 1994-1999, menunjukkan bahwa lapangan usaha yang mengalami peningkatan yaitu pertanian; industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; perdagangan, hotel dan restoran. Sedangkan lapangan usaha yang mengalami penurunan yaitu pertambangan dan penggalan, bangunan, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, dan jasa.

Berdasarkan distribusi lapangan usaha tersebut, maka secara umum struktur perekonomian daerah menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir (1994-1999) belum terjadi pergeseran struktur yang berarti dan sektor tersier adalah yang paling dominan. Sektor primer (pertanian dan pertambangan) mengalami sedikit peningkatan yaitu dari 19,40% pada tahun 1994 menjadi 22,32% pada tahun 1999, sedangkan sektor sekunder (industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; dan bangunan) menurun dari 24,63% pada tahun 1994 menjadi 24,01 % pada tahun 1999, dan sektor tersier (perdagangan; pengangkutan dan komunikasi; keuangan; dan jasa) yang merupakan sektor yang paling dominan juga menunjukkan sedikit penurunan dari 55,97% pada tahun 1994 menjadi 53,67% pada tahun 1999.

b. Komoditas Unggulan Daerah

Berdasarkan analisis potensi wilayah, komoditas unggulan daerah yang mendukung keberhasilan pembangunan di daerah adalah meliputi komoditas pertanian dalam arti luas, komoditas industri, komoditas pariwisata budaya dan sejarah serta komoditas pendidikan, seni dan budaya.

c. Perkembangan Usaha dan Investasi Daerah

Perkembangan usaha daerah yang berasal dari Perusahaan Daerah Anindya dan Tarumartani secara keseluruhan menunjukkan adanya sedikit peningkatan. Namun demikian dalam pengembangan usaha daerah ini masih juga menghadapi masalah yang berkaitan dengan profesionalisme manajemen pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), masalah persaingan dan permodalan.

Perkembangan investasi baik Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), maupun Penanaman Modal Non Fasilitas pada tahun 1996 hingga tahun 1999 secara umum menunjukkan gejala penurunan.

d. Ketenagakerjaan

Lapangan pekerjaan utama yang banyak menyerap tenaga kerja baik pada tahun 1990 maupun pada tahun 1999 adalah pertanian, jasa, perdagangan, dan industri. Perkembangan penyerapan tenaga kerja menurut lapangan pekerjaan, mulai menunjukkan suatu pergeseran yaitu dari sektor primer yang bersifat tradisional (lapangan pekerjaan pertanian) yaitu dari 45,98% turun menjadi 31,47%, sektor tersier (lapangan pekerjaan perdagangan, keuangan dan jasa) dari 34,39% naik menjadi 48,52%, dan sektor sekunder (lapangan pekerjaan industri pengolahan) dari 19,63% naik menjadi 20,01% yang bersifat lebih modern.

Pemerintah telah berupaya untuk memperluas kesempatan kerja, yaitu dari 1.392.552 orang pada tahun 1990 menjadi 1.624.079 orang pada tahun 1999 sehingga terdapat pertumbuhan sebesar 1,18%. Namun demikian dengan menurunnya laju pertumbuhan perekonomian daerah, sejumlah angkatan kerja yang belum tertampung dalam lapangan kerja jumlahnya cukup banyak. Pada tahun 1990 jumlah angkatan kerja ada 1.521.447 orang telah meningkat menjadi 1.624.079 orang pada tahun 1999 atau terdapat pertumbuhan sebesar 0,73%.

Berdasarkan dari data tersebut maka jumlah pengangguran pada tahun 1990 ada 37.731 orang atau dengan tingkat pengangguran sebesar 2,48% dan pada tahun 1999 menjadi 76.449 orang atau dengan tingkat pengangguran sebesar 4,71%. Sedangkan setengah pengangguran dari 38,72% telah turun menjadi 35,03%. Menurunnya laju pertumbuhan ekonomi juga berpengaruh terhadap menurunnya proporsi kesempatan kerja formal yaitu dari 47,53% menjadi 39,58% sedangkan informal meningkat dari 52,47% menjadi 60,42%.

e. Pertanian

Penggunaan lahan untuk pertanian secara umum dapat dikelompokkan menjadi lahan sawah seluas 59.729 ha, lahan pekarangan 86.725 ha, tegalan seluas 109.432 ha, hutan 17.060 ha. Penggunaan lahan sawah yang didasarkan pada jenis pengairan meliputi pengairan teknis seluas 18.547 ha, irigasi setengah teknis 23.729 ha, irigasi sederhana seluas 6.907 ha, irigasi desa seluas 1.786 ha, serta sawah tadah hujan seluas 8.760 ha.

Potensi perikanan darat meliputi kolam seluas 4.630,2 ha, sawah seluas 10.365,6 ha, perairan umum seluas 3.133,5 ha, sedangkan perikanan laut di pantai selatan sepanjang 110 km dengan pantai berpasir seluas 650 ha berpotensi untuk dikembangkan tambak permanen maupun pembenihan (*hatchery*). Potensi peternakan, antara lain luasan tegal sebesar 34,35 % dari luas keseluruhan sebagai potensi untuk pengusahaan hijauan makanan ternak (HMT).

Apabila dilihat dari sumbangan sektor pertanian terhadap PDRB berdasarkan harga konstan pada tahun 1999 sebesar 15,48 % merupakan sumbangan terbesar ketiga setelah jasa, perdagangan, hotel dan restoran. Sedangkan lapangan pekerjaan utama di sektor pertanian pada tahun 1999 sebesar 31,47 %, hal ini merupakan lapangan pekerjaan utama terbesar penduduk DIY.

Komoditas tanaman pangan yang dominan dari sisi produksi adalah padi, ubi kayu, jagung, kacang tanah, dan buah-buahan, sedangkan tanaman perkebunan meliputi kelapa, kopi, kakao dan jambu mete, tanaman kehutanan yang dominan adalah minyak kayu putih dan kayu pertukangan. Dari subsektor peternakan produk dominan adalah daging, telur dan susu, sedangkan produk dominan dari subsektor perikanan meliputi ikan air tawar, benih ikan/udang dan ikan hias.

Apabila melihat pola konsumsi penduduk DIY tahun 1999, yang melebihi standar Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi tingkat nasional adalah padi-padian, umbi-umbian, buah/biji berminyak dan gula, sedangkan pola konsumsi yang masih dibawah PPH nasional adalah pangan hewani, minyak dan lemak. Untuk konsumsi kacang-kacangan, sayuran dan buah sudah mendekati standar PPH nasional.

f. Industri Kecil dan Menengah

Perkembangan potensi industri kecil dan menengah yang tersebar di seluruh wilayah DIY selama lima tahun terakhir menunjukkan suatu keadaan yang relatif stabil terhadap gejolak krisis ekonomi.

Hal ini ditunjukkan dengan masih banyaknya unit usaha industri kecil dan menengah yang eksis yaitu pada tahun 1994 ada 76.489 unit usaha, dengan nilai investasi sebesar Rp 343.107 juta, dan nilai produksi sebesar Rp 691.646 juta, yang menyerap tenaga kerja 206.474 orang. Kemudian pada tahun 1999 ada 77.526 unit usaha, dengan nilai investasi sebesar Rp 412.845 juta, dan nilai produksi sebesar Rp 1.109.394 juta, dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 219.279 orang. Namun demikian, untuk mengembangkan potensi industri kecil dan menengah masih menghadapi permasalahan seperti permodalan dan pemasaran.

Industri kecil dan kerajinan di Yogyakarta mempunyai keunggulan komparatif karena mampu menyerap tenaga kerja dan memanfaatkan sumberdaya alam setempat, serta mempunyai keunggulan kompetitif yang didukung oleh sumberdaya manusia yang potensial, institusi yang ada baik dari Perguruan Tinggi maupun dari Balai Penelitian dan Pengembangan (Litbang), sehingga secara sinergi mendukung pariwisata dan perdagangan daerah.

Beberapa sentra industri telah menjadi desa wisata dan desa kerajinan seperti Desa Kasongan Bantul (kerajinan gerabah), Desa Pucung Bantul (kerajinan kayu primitif), Desa Pundong Bantul (kerajinan gerabah), Desa Manding Bantul (kerajinan kulit), Desa Putat Gunungkidul (kerajinan topeng), Desa Sendari Sleman (kerajinan bambu), Tirtodipuran Yogyakarta (kerajinan batik).

Sumbangan sektor industri dan perdagangan terhadap *Product Domestic Regional Bruto* (PDRB) DIY tahun 1998 dan 1999 masing-masing 48,93 % dan 57,81 %. Realisasi ekspor DIY pada tahun 1999 sebesar US \$ 91,6 juta dengan volume sebesar 36.218 ton, sedangkan jumlah mata dagangan ekspor seluruhnya mencapai 74 dagangan dengan pelaku ekspornya sebanyak 155, dan negara tujuan ekspor 71 negara. Beberapa komoditas ekspor unggulan DIY antara lain tekstil dan produk tekstil, mebel kayu dan kerajinan kayu, kulit dan produk kulit, gerabah/ keramik, jamur dalam kaleng, kerajinan besi dan kerajinan perak.

g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

APBD Propinsi DIY, sebagai pencerminan dukungan anggaran untuk pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dari tahun anggaran 1995/1996 sampai dengan tahun anggaran 1999/2000 berdasarkan perhitungan APBD mengalami penurunan, baik dari aspek pendapatan maupun dari aspek belanja.

Pada tahun 1995/1996 realisasi jumlah pendapatan sebesar Rp.247.656.753.816,49 turun menjadi Rp.196.604.983.894,00 pada tahun 1999/2000. Penurunan ini salah satu faktornya adalah menurunnya pendapatan yang berasal dari sumbangan dan bantuan atau bagian pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah atau instansi yang lebih tinggi menurun jumlahnya. Pada tahun 1995/1996 jumlah sumbangan dan bantuan ada Rp.159.620.258.579,00 kemudian pada tahun 1999/2000 bagian pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah atau instansi yang lebih tinggi hanya sebesar Rp.114.127.200.543,31. Adapun Pendapatan Asli Daerah terjadi peningkatan, yaitu dari Rp.46.691.239.552,36 pada tahun 1995/1996 menjadi Rp.57.877.499.768,81 pada tahun 1999/2000.

Sedangkan dari aspek belanja, realisasi pada tahun 1995/1996 sebesar Rp. 235.570.680.179,28 yang terdiri dari belanja rutin sebesar Rp. 169.757.326.541,52 dan belanja pembangunan sebesar Rp. 39.938.107.839,09 serta urusan kas dan perhitungan sebesar Rp. 25.875.245.798,67.

Pada tahun 1999/2000 jumlah belanja sebesar Rp. 172.635.129.754,73 yang terdiri dari belanja rutin sebesar Rp. 103.997.630.249,28 dan belanja pembangunan Rp. 53.014.934.124,45 serta urusan kas dan perhitungan sebesar Rp. 15.622.565.381,00.

5. Pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk di DIY secara kuantitas dan kualitas cukup tinggi dan menunjukkan peningkatan selama periode tahun 1990 sampai dengan 1999.

Data yang ada menunjukkan adanya penurunan penduduk yang tidak/belum sekolah sebesar 12,56 %, penduduk tidak tamat SD turun dari 21,53 % menjadi 16,46 %, penduduk tamat SD turun dari 25,97 % menjadi 22,84 %, penduduk tamat SMTP meningkat dari 13,49 % menjadi 17,25 %, tamat SMU meningkat dari 15,88 % menjadi 24,56 %, tamat D1 dan D2 dari 0,39 % menjadi 1,02 %, tamat akademis/D3 dari 1,12 % menjadi 2,24 %, dan tamat Universitas/D4 dari 1,40 % menjadi 3,05 %.

6. Agama dan Sosial Budaya

a. Agama

Iman dan taqwa sebagai hasil manifestasi kehidupan beragama adalah merupakan sumber inspirasi, sumber motivasi dan merupakan modal dasar untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan mengurangi/menghilangkan penyakit sosial yang saat ini marak berkembang di daerah. Kondisi yang ada menunjukkan bahwa tingkat keimanan dan ketaqwaan masih perlu ditingkatkan dan diaktualisasikan berdasarkan norma-norma agama dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

b. Kebudayaan

Karakteristik umum masyarakat DIY, yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, adalah tabah, sederhana dan hemat, berani mawas diri, gotong royong dalam kebersamaan, tenggang rasa dan memiliki jiwa patriotisme, serta dapat menyesuaikan terhadap sesama, merupakan sikap mental yang perlu diupayakan kelestariannya. Di samping itu DIY memiliki seni budaya yang adiluhung dan berbagai peninggalan budaya masa lalu yang mempunyai nilai tinggi, serta menjadi tempat bertemunya berbagai macam budaya yang dibawa oleh para pendatang, yang justru diharapkan akan memperkuat budaya bangsa Indonesia.

c. Kesehatan

Derajat kesehatan dan gizi masyarakat telah menunjukkan peningkatan, hal ini terlihat adanya perbaikan beberapa indikator kesehatan, antara lain menurunnya angka kematian bayi, angka kematian balita, angka kematian ibu melahirkan, meningkatnya status gizi dan menurunnya angka kesakitan serta meningkatnya usia harapan hidup. Namun demikian perilaku hidup sehat masyarakat masih perlu ditingkatkan.

d. Keluarga Pra Sejahtera

Berdasarkan hasil pendataan keluarga pada tahun 1994 hingga tahun 1997 secara umum jumlah keluarga pra sejahtera mengalami penurunan. Tetapi sejak tahun 1998 sampai tahun 1999 jumlah keluarga pra sejahtera meningkat, sejalan dengan keadaan krisis ekonomi yang sedang melanda Indonesia.

7. Pariwisata

Pariwisata DIY masih bertumpu pada pariwisata budaya, sejarah dan pendidikan, dengan obyek utama adalah kraton, candi, museum, dan perguruan tinggi. Data statistik menunjukkan bahwa pada tahun-tahun terakhir ini, jumlah wisatawan yang mengunjungi DIY mengalami penurunan. Pada tahun 1997 jumlah wisatawan yang mengunjungi DIY sebanyak 6.644.145 orang, dan tahun 1998 jumlah kunjungan 3.762.114 orang atau menurun 44,38 %. Sedangkan pada tahun 1999 jumlah kunjungan 5.209.449 orang. Apabila dibandingkan dengan jumlah kunjungan tahun 1998 mengalami peningkatan 38,47 %.

Lama tinggal wisatawan di DIY masih rendah. Pada tahun 1997 lama tinggal wisatawan Nusantara hanya 1,61 hari, dan wisatawan manca negara 2,11 hari. Pada tahun 1998, rata-rata lama tinggal wisatawan Nusantara 1,5 hari dan wisatawan manca negara 1,91 hari. Sedangkan untuk tahun 1999 rata-rata lama tinggal wisatawan Nusantara 1,79 hari dan wisatawan manca negara 2,47 hari.

8. Pemerintahan

Dari segi kuantitas jumlah aparat pemerintah di Propinsi DIY pada tahun 1999 sudah sangat memadai. Namun dari sisi kualitas, perlu ditingkatkan karena sebagian besar aparat Pemerintah Daerah (Pemda) berpendidikan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SLTA). Di samping itu apabila dilihat dari sisi persyaratan perlu mendapatkan perhatian, karena banyak yang belum sesuai dengan kebutuhan formasi. Sedangkan untuk sarana prasarana yang dimiliki, relatif sudah cukup memadai, namun distribusi penggunaannya perlu ada pemerataan.

Dari segi kelembagaan yang ada sekarang, masih terjadi duplikasi tugas dan fungsi sehingga mengakibatkan tidak efektifnya kegiatan dan rendahnya efisiensi kinerja Pemda. Untuk itu perlu diadakan penataan ulang struktur organisasi Pemda, berdasar kewenangan dan beban tugas yang ada.

Pelayanan yang diberikan oleh aparat Pemda, masih belum sesuai dengan harapan masyarakat. Untuk itu perlu peningkatan kinerja dan etos kerja aparatur pemerintah di semua jenjang pemerintahan dalam upaya memberikan pelayanan terbaik dan secara terpadu bagi masyarakat.

9. Politik

Kondisi politik di Propinsi DIY relatif stabil dan kondusif, walaupun terjadi konflik politik dan gejolak konflik serta kerawanan-kerawanan sosial, tetapi tidak banyak berpengaruh terhadap stabilitas politik di Propinsi DIY. Di sisi lain kesadaran dan partisipasi politik masyarakat cukup tinggi. Hal ini terlihat pada antusias masyarakat untuk ikut serta dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, kampanye pemilu dan penggunaan hak pilih dalam pemilu.

10. Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban

Berbagai kerawanan yang timbul berpengaruh pada rasa aman dan kedamaian masyarakat. Untuk itu perlu adanya peningkatan kesadaran segenap warga akan pentingnya perlindungan dan pengamanan masyarakat dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu ketentraman dan kedamaian masyarakat.

B. K E N D A L A

1. Rendahnya Dayadukung terhadap Pengembangan Perekonomian Wilayah

Sumberdaya yang terdapat di DIY, terutama sumberdaya alam, tidak cukup tersedia untuk dapat mendukung pengembangan perekonomian wilayah. Lahan pertanian yang tersedia sangat terbatas, terutama lahan beririgasi yang tercatat seluas kurang dari 60.000 hektar dan cenderung menyusut karena perubahan penggunaan lahan.

Sumberdaya air yang tersedia melalui tiga sungai utama, yaitu Sungai Progo, Sungai Opak dan Sungai Oyo ketersediaannya sangat dipengaruhi oleh musim, sedangkan satu-satunya waduk yaitu Waduk Sermo di Kabupaten Kulon Progo hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan air irigasi sekitar 2.000 hektar dan untuk air minum saat ini hanya tersedia sebesar 20 liter/detik.

Deposit bahan tambang yang tersedia, juga tidak cukup untuk secara ekonomis ditambang dalam skala besar, namun lebih merupakan pertambangan rakyat. Walaupun upaya penghijauan telah dapat mengurangi luas lahan kritis dari 67.001 hektar menjadi 21.049 hektar, tetapi luas hutan keseluruhan sebesar 35.324 hektar atau hanya sekitar 11 % dari luas Propinsi DIY.

2. Kesenjangan Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi antar Wilayah Pengembangan

Terdapat disparitas yang nyata (*significant*) dalam perkembangan dan pertumbuhan ekonomi antara wilayah pengembangan. Diantara keempat kawasan pengembangan, Kawasan Pengembangan Tengah merupakan kawasan yang pertumbuhan dan perkembangan ekonominya paling maju. Dua kawasan lainnya, yaitu Kawasan Pengembangan Barat dan Kawasan Pengembangan Timur perkembangan ekonominya masih ketinggalan dibandingkan dengan Kawasan Pengembangan Wilayah Tengah, ini antara lain ditunjukkan dengan adanya kawasan/desa tertinggal di kedua kawasan pengembangan tersebut. Kawasan Pengembangan Pesisir walaupun masih kalah dengan Kawasan Tengah namun karena merupakan daerah penyangga bagi Kawasan Tengah nampaknya akan segera menempatkan diri setingkat di bawah Kawasan Tengah.

3. Penurunan Kualitas Lingkungan

Penurunan kualitas lingkungan tidak hanya ditunjukkan oleh terjadinya pencemaran air (air sungai maupun air bawah tanah) dan pencemaran udara, namun juga oleh terjadinya degradasi lahan terutama lahan pertanian yang menjadi lahan kritis yang jumlahnya berkisar 21.000 hektar tersebar di seluruh wilayah.

Kesulitan dalam pengendalian pencemaran ini adalah karena rendahnya kesadaran masyarakat akan kelestarian lingkungan, kurang memadainya prasarana dan sarana kelestarian lingkungan dan diabaikannya peraturan perundangan tentang pengendalian pencemaran lingkungan.

4. Tata Ruang yang Tidak Ditepati

Walaupun Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi DIY dalam bentuk Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi (RSTRP) telah dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 tahun 1992 dan telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri, namun dalam kenyataannya banyak peruntukan lahan/ruang yang tidak sesuai dengan yang sudah ditetapkan dalam RSTRP yang seringkali menyebabkan munculnya konflik penggunaan lahan.

5. Ketimpangan antara Kesempatan Kerja dengan Angkatan Kerja

Kesempatan kerja yang lebih luas dan merata belum dapat diwujudkan pada saat ini terutama dalam kaitannya dengan persyaratan atau kualifikasi kebutuhan tenaga, terutama pada sektor industri dan sektor tersier, karena kesempatan kerja dan berusaha di DIY didominasi oleh sektor-sektor informal dan atau sektor ekonomi rakyat yang untuk pengembangannya diperlukan pengerahan sumberdaya dan dana yang cukup besar.

Terbatasnya perluasan kesempatan kerja pada sektor formal, menyebabkan jumlah angkatan kerja yang terus bertambah setiap tahunnya tidak dapat terserap dan makin bertambahnya pengangguran terutama penganggur terbuka dengan dasar pendidikan setingkat SLTA dan Perguruan Tinggi (D3/S1).

6. Kawasan Tertinggal dan Kemiskinan

Masih terdapatnya desa-desa tertinggal di Kawasan Pengembangan Barat dan Kawasan Pengembangan Timur serta jumlah keluarga pra sejahtera yang masih sekitar 21,10 % pada tahun 2000 menunjukkan bahwa kondisi masyarakat masih belum mencapai tingkat kesejahteraan ekonomi yang diharapkan.

7. Penyediaan Tanah untuk Pembangunan

Banyak proyek-proyek pembangunan yang mengalami hambatan dalam pelaksanaan program-programnya karena masalah penyediaan lahan. Kurangnya kesadaran akan tujuan pembangunan menyebabkan masyarakat cenderung menuntut nilai ganti-rugi tanah yang lebih tinggi dari Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) dan hal ini disebabkan adanya pengaruh pihak ketiga yang berusaha memaksakan keinginan pribadi atau golongan dengan mengatasnamakan rakyat.

8. Ketidakmerataan Latar Belakang Pendidikan Masyarakat

Walaupun Yogyakarta mempunyai predikat sebagai kota pendidikan, namun masyarakatnya sendiri tidak semuanya mempunyai kesempatan untuk meneruskan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi atau dalam mendapatkan pendidikan keahlian, terutama dikarenakan oleh faktor ekonomi.

Ketidakmerataan pendidikan dari masyarakat dapat menjadi penyebab dari munculnya kesenjangan sosial antar strata masyarakat yang jika tidak ditangani dengan segera akan menyebabkan kerawanan sosial.

9. Ketidaksetaraan *Gender*

Ketidakadilan dan ketidaksetaraan *gender* mengakibatkan lahirnya sifat dan stereotip yang sebetulnya merupakan rekayasa sosial yang akhirnya terkukuhkan menjadi semacam kodrat yang kultural yang dalam proses panjang mengakibatkan terkondisikannya posisi perempuan yang berbeda dengan kaum laki-laki dalam beberapa posisi, misalnya di bidang politik, ekonomi, sosial dan lain-lain.

10. Rendahnya Kinerja Kelembagaan dan Kemampuan Aparatur Pemerintahan

Rendahnya kinerja dari instansi pemerintah DIY terutama disebabkan oleh rendahnya kemampuan dan kompetensi aparatur pemerintah karena latar belakang pendidikan yang kurang mencukupi (hampir didominasi oleh lulusan SLTA).

Selain karena latar belakang pendidikan, sistem kepegawaian yang ada juga menjadi penyebab rendahnya kinerja karena :

- a. Rekrutmen pegawai yang tidak didasarkan kepada *fit and proper test*.
- b. Tidak adanya *carrier planning*.
- c. Sistem penilaian kinerja pegawai yang tidak menunjukkan prestasi kerja
- d. Tidak adanya penghargaan terhadap prestasi kerja.
- e. Kurang tegasnya pemberian sanksi (*punishment*) kepada aparat yang melakukan pelanggaran.

11. Potensi Konflik

Kondisi yang ada di Propinsi DIY relatif aman dan terkendali. Namun dalam substansi kendala tidak tertutup kemungkinan terjadinya konflik jika terdapat ketimpangan-ketimpangan dalam penanganan sosial ekonomi dan kemasyarakatan serta tidak dilaksanakannya supremasi hukum maupun penegakan kembali bangunan ketahanan budaya dan kerukunan antar warga yang didukung oleh pendekatan kerukunan hidup beragama dan bermasyarakat.

12. Potensi Bencana Alam

Secara umum, jenis-jenis bencana alam yang mengancam Propinsi DIY dapat diidentifikasi, sebagai berikut :

- a. Bencana alam Gunung Merapi, mengancam wilayah Sleman bagian utara dan wilayah-wilayah sungai yang berhulu di puncak Merapi;
- b. Bencana longsor dan erosi, terutama mengancam wilayah Kulon Progo bagian utara dan barat serta dataran tinggi Gunungkidul bagian utara;
- c. Wilayah rawan banjir, mengancam daerah pantai selatan Kulon Progo dan Bantul;
- d. Wilayah rawan kekeringan, biasa terjadi di wilayah Gunungkidul bagian selatan;
- e. Wilayah rawan tsunami, terdapat di daerah pantai selatan Kulon Progo dan Bantul;
- f. Bencana alam akibat angin, biasa terdapat di wilayah pantai selatan Kulon Progo dan Bantul serta daerah-daerah kabupaten Sleman bagian utara.

C. PROYEKSI PERTUMBUHAN

1. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi

a. Pertumbuhan Ekonomi DIY Pasca Krisis Moneter

Salah satu data statistik yang digunakan sebagai indikator untuk menganalisis dan mengevaluasi perkembangan perekonomian suatu daerah adalah data *Product Domestic Regional Bruto* (PDRB). Data PDRB DIY menunjukkan bahwa pada kurun waktu tahun 1994 – 1997 adalah sebesar 6,69 % namun dengan terjadinya krisis ekonomi maka merosot tajam pada tahun 1998 bahkan mengalami kontraksi sebesar 11,18 % dan baru menunjukkan gejala kenaikan pada tahun 1999 yaitu sebesar 0,99 %.

Pemulihan kondisi perekonomian memang belum seperti sebelum terjadinya krisis moneter, namun demikian terdapat beberapa sektor yang mengalami pemulihan yang cukup menggembirakan, yaitu sektor industri pengolahan sebesar 3,43 % dan sektor bangunan sebesar 3,21 %. Sektor-sektor lain mengalami pertumbuhan dengan angka antara 2 – 3 %, seperti sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 2,48 %, sektor jasa-jasa sebesar 2,32 %, sedangkan sektor keuangan persewaan dan jasa perusahaan hanya mencapai 0,67 %. Satu-satunya sektor yang tidak mengalami pemulihan adalah sektor pertanian dengan angka -5,50 %.

Relatif tingginya pertumbuhan sektor industri dikarenakan tetap bertahanya industri kecil dan kerajinan rumah tangga yang memanfaatkan bahan lokal dan sisa industri lain dengan produk yang dipasarkan secara regional dan global.

b. Peran Sektor-sektor Ekonomi DIY

Struktur perekonomian suatu daerah sangat ditentukan oleh besarnya peranan sektor-sektor ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Struktur perekonomian yang terbentuk dari nilai tambah yang dapat diciptakan oleh masing-masing sektor dapat menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi dari setiap sektor ekonomi.

Sebelum dan selama berlangsungnya krisis moneter, pada struktur ekonomi yang didasarkan atas sembilan lapangan usaha kontribusi terbesar kepada PDRB atas dasar harga konstan selalu didominasi oleh sektor jasa-jasa. Pada tahun 1999 struktur perekonomian DIY didominasi oleh empat sektor ekonomi yang memberikan kontribusi terbesar dengan angka diatas 14 %, yaitu secara berurutan adalah, sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor industri pengolahan. Sektor-sektor lainnya memberikan kontribusi dengan angka lebih rendah daripada 12 %, bahkan sektor listrik, gas dan air bersih hanya memberikan kontribusi sebesar 0,73 %.

c. Pergeseran Struktur Perekonomian Daerah

Sektor-sektor dalam PDRB biasanya dikelompokkan ke dalam tiga kelompok besar, yaitu :

- 1) Kelompok sektor primer yang terdiri dari sektor-sektor ekonomi dengan keluaran (*output*) berupa hasil dari eksploitasi sumberdaya alam seperti sektor pertanian dan sektor pertambangan/penggalan.
- 2) Kelompok sektor sekunder adalah sektor-sektor ekonomi yang inputnya berasal dari sektor primer, meliputi antara lain sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air, serta sektor bangunan.
- 3) Kelompok sektor tersier terdiri dari sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor angkutan, sektor keuangan, dan sektor jasa-jasa.

Dibandingkan dengan tahun 1998 dan tahun-tahun sebelumnya ternyata pada tahun 1999 telah terjadi pergeseran peranan dari kelompok sektor terhadap pembentukan PDRB atas dasar harga konstan. Pada tahun 1998 peranan kelompok sektor primer adalah sebesar 21,84% ternyata meningkat menjadi 23,45 % pada tahun 1999. Demikian juga pada kelompok sektor sekunder meningkat menjadi 23,69 % sedangkan penurunan peranan terjadi pada kelompok sektor tersier dari 54,56 % pada tahun 1998 menjadi 52,86 % pada tahun 1999 walaupun demikian kelompok sektor ini masih mendominasi kontribusi untuk PDRB DIY.

Tabel 1
Product Domestic Regional Bruto (PDRB)
Berdasarkan Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 1993
(dalam jutaan rupiah)

NO	SEKTOR	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
1	Pertanian	699.851	716.889	747.526	795.211	822.446	778.139	733.399
2	Pertambangan dan Penggalian	59.270	64.045	67.714	69.960	71.548	60.251	60.251
3	Industri Pengolahan	511.439	601.917	635.002	694.724	701.976	659.816	682.440
4	Listrik, gas dan air bersih	20.230	23.994	25.815	28.896	31.374	31.429	32.129
5	Bangunan	422.300	451.468	493.891	532.827	552.853	371.345	383.269
6	Perdagangan, hotel, restoran	623.561	676.167	733.368	797.939	828.299	742.580	761.008
7	Pengangkutan dan telkom.	467.263	502.371	538.537	575.293	593.459	541.280	552.812
8	Kuangan, Persewaan, jasa perusahaan	415.609	444.862	499.920	544.356	567.462	527.472	531.007
9	Jasa-jasa	834.516	901.028	995.338	1.067.143	1.116.950	977.631	1.000.279
	PDRB	4.054.039	4.382.741	4.737.111	5.106.349	5.286.367	4.689.943	4.737.209

Sumber : PDRB Propinsi DIY

Kerjasama Bappeda Propinsi DIY dengan BPS Propinsi DIY, Desember 2000

Apabila dilihat dalam persentase pertumbuhan sektor lapangan usaha dalam pembentukan PDRB DIY maka kontribusi dari masing-masing sektor (dalam persentase) dapat dilihat pada Tabel 2, sebagai berikut:

Tabel 2
Pertumbuhan Sektor Lapangan Usaha DIY
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 – 1999
(dalam persentase)

NO	SEKTOR	1993-1994	1994-1995	1995-1996	1996-1997	1997-1998	1998-1999
1	Pertanian	2,43	4,27	6,40	3,42	- 5,39	- 5,75
2	Pertambangan dan Penggalian	8,06	5,73	3,32	2,27	- 15,79	0,37
3	Industri Pengolahan	17,69	5,50	9,41	1,04	- 6,01	3,43
4	Listrik, gas dan air bersih	18,61	7,59	11,93	8,58	0,18	12,46
5	Bangunan	6,91	9,40	7,88	3,76	- 32,83	3,21
6	Perdagangan, hotel, restoran	8,44	8,46	8,80	3,80	- 10,35	2,48
7	Pengangkutan dan telkom.	7,51	7,20	6,83	3,16	- 8,79	2,13
8	Keuangan, Persewaan, jasa perusahaan	7,04	12,38	8,89	4,24	- 7,05	0,67
9	Jasa-jasa	7,97	10,47	7,21	4,67	- 12,47	2,32
	TOTAL DIY	8,00	7,98	7,74	3,51	- 11,18	0,99

*Sumber : PDRB Propinsi DIY
Kerjasama Bappeda Propinsi DIY dengan BPS Propinsi DIY,
Desember 2000*

Distribusi persentase PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha adalah sebagaimana terlihat pada Tabel 3, sebagai berikut:

Tabel 3
Distribusi Persentase PDRB Propinsi DIY
Atas Dasar Harga Konstan
menurut Lapangan Usaha Tahun 1993 - 1999

NO	SEKTOR	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
1	Pertanian	17,26	16,36	15,78	15,57	15,56	16,59	15,48
2	Pertambangan dan Penggalian	1,46	1,46	1,43	1,37	1,35	1,28	1,27
3	Industri Pengolahan	12,62	13,73	13,40	13,61	13,28	14,07	14,41
4	Listrik, gas dan air bersih	0,50	0,55	0,54	0,57	0,59	0,67	0,68
5	Bangunan	10,42	10,30	10,43	10,43	10,46	7,92	8,09
6	Perdagangan, hotel, restoran	15,38	15,43	15,48	15,63	15,67	15,83	16,08
7	Pengangkutan dan telkom.	11,53	11,46	11,37	11,27	11,23	11,54	11,67
8	Keuangan, Persewaan, jasa perusahaan	10,25	10,15	10,55	10,66	10,73	11,25	11,21
9	Jasa-jasa	20,58	20,56	21,01	20,90	21,13	20,85	21,12
	PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : PDRB Propins
Kerjasama Bappeda Propinsi DIY dengan BPS Propinsi DIY, Desember 2000

Dari tabel-tabel tersebut nampak bahwa telah terjadi pergeseran struktur ekonomi dari sektor pertanian menuju ke sektor industri dan sektor jasa.

Dalam perekonomian terbuka, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan suatu wilayah selain faktor konsumsi adalah faktor-faktor transfer, selisih ekspor-impor dan juga besaran investasi. Dengan demikian peran investasi menjadi sangat penting dalam memperkirakan pertumbuhan ekonomi yang dalam hal ini dikaitkan dengan *Incremental Capital Output Ratio (ICOR)*. Besaran yang disebut ICOR tersebut merupakan perbandingan antara besarnya tambahan modal (*capital*) yang dibutuhkan untuk meningkatkan tambahan satu unit *output*. Secara konseptual besaran ICOR

dapat merefleksikan besarnya produktivitas modal dan dengan sendirinya juga perkiraan pertumbuhan ekonomi. Selain itu dapat juga dikatakan bahwa laju pertumbuhan ekonomi merupakan hasil bersama antara kuantitas dengan kualitas investasi. Semakin baik kualitas investasi akan semakin kecil angka ICOR dan sebaliknya.

Tabel 4 menunjukkan besarnya investasi, pertumbuhannya dan ICOR di DIY pada tahun 1993 – 1998.

Tabel 4
Data Investasi, Pertumbuhan dan ICOR di DIY
Tahun 1993 – 1998 (menurut harga konstan 1993)

NO	TAHUN	INVESTASI (JUTA RUPIAH)	PERTUMBUHAN	ICOR
1	1993	1.087.509	244.107	4,45
2	1994	1.191.737	350.036	3,62
3	1995	1.291.954	350.036	3,69
4	1996	1.394.753	369.239	3,78
5	1997	1.409.369	180.018	7,83
6	1998	1.111.794	- 600.590	- 1,85

*Sumber : Penyusunan ICOR Propinsi DIY,
 Kerjasama Bappeda Propinsi DIY dengan PPE Fakultas Ekonomi UGM,
 Agustus 2000*

d. Prakiraan Pertumbuhan Ekonomi DIY

Disadari bahwa pengertian pembangunan ekonomi bukan hanya sekedar menaikkan PDRB saja namun juga keharusan untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang ada serta meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya, sehingga tetap dibutuhkan adanya dukungan yang berupa perbaikan sistem kelembagaan yang menyangkut dua aspek yaitu, perbaikan di bidang institusi dan perbaikan di bidang regulasi (kebijakan).

Didasarkan kepada data yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka prakiraan pertumbuhan ekonomi DIY pada kurun tahun 2001 sampai dengan 2005 diharapkan akan lebih baik daripada sebelum terjadinya krisis dengan asumsi bahwa faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap kinerja perekonomian akan bersifat kondusif. Kegiatan-kegiatan ekonomi ini akan menyangkut berbagai hal-hal yang saling mendukung, berupa pembangunan dunia usaha, pembangunan prasarana dan sarana, pengembangan sumberdaya manusia dan pengembangan serta pemberdayaan masyarakat. Hasil-hasil yang diharapkan nantinya akan berujud pengembangan lapangan kerja bagi penduduk, pencapaian stabilitas dan

pertumbuhan ekonomi daerah, serta pengembangan basis ekonomi dan kesempatan kerja yang lebih beragam.

Dengan mengamati kecenderungan pertumbuhan ekonomi, kontribusi sektor-sektor dalam pembentukan PDRB serta ICOR pada tahun-tahun lalu, disertai dengan pengambilan asumsi-asumsi yang akan berpengaruh di masa depan sebagaimana disebutkan di atas, maka kebijakan pemerintah daerah yang dituangkan dalam program pembangunan harus dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, yaitu dalam bentuk :

- 1) Peningkatan pertumbuhan ekonomi.
- 2) Peningkatan pemerataan pendapatan masyarakat.
- 3) Peningkatan kesempatan kerja.
- 4) Peningkatan pemerataan pembangunan antar wilayah.

Pertumbuhan ekonomi DIY diperkirakan akan meningkat dari tahun ke tahun dalam periode 2001 – 2005 dengan pertumbuhan rata – rata 4,50 %, sedangkan ICOR akan menurun dari tahun ke tahun dengan rata-rata ICOR 5,00.

Terkait dengan investasi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan, terutama faktor-faktor yang mempengaruhi besaran investasi baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun sektor swasta (termasuk masyarakat). Investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah tergantung kepada besarnya pendapatan asli daerah (PAD), dana *block grant* dari pemerintah pusat, dana sektoral baik berupa Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (APBN) maupun Bantuan Luar Negeri (BLN) yang dilaksanakan di daerah. Besarnya investasi swasta dipengaruhi oleh iklim bagi kegiatan dunia usaha yang antara lain berupa kebijakan fiskal dan kebijakan moneter serta kebijakan lokal mengenai pengembangan dunia usaha di daerah.

2. Indeks Pembangunan Manusia

Gambaran tingkat keberhasilan pembangunan yang berorientasi pada manusia yang juga merupakan gambaran kualitas hidup penduduk ditunjukkan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dihitung berdasar indeks komposit dari angka harapan hidup, pendidikan (indeks melek huruf dan indeks rerata lama sekolah) dan indeks daya beli (konsumsi riil per kapita).

Dengan skala nilai mulai dari 0 (terburuk) sampai dengan 100 (terbaik) didapatkan hasil perhitungan IPM di DIY pada tahun 1996 menunjukkan angka 71,80, sedangkan pada tahun 1999 menurun menjadi 68,70. Penurunan kualitas penduduk di DIY seperti ditunjukkan pada angka-angka di atas adalah sebagai dampak dari terjadinya krisis ekonomi dimulai pada tahun 1997. Penurunan IPM pada tahun 1999 diperkirakan disebabkan oleh menurunnya daya beli masyarakat karena melambungnya berbagai biaya hidup dan terjadinya inflasi yang tinggi pada kurun tahun 1996 – 1999.

Pada tahun 2000 IPM Propinsi DIY menempati urutan kedua di tingkat nasional setelah DKI Jakarta.

Tabel 5 menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota se DIY pada tahun 1999.

Tabel 5
Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten/Kota se Propinsi DIY Tahun 1999

No	Kabupaten/ Kota	Angka Harapan Hidup (tahun)	Melek Huruf (%)	Lama Sekolah (tahun)	Pengeluaran per kapita/ bulan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
1	Kulon Progo	71,45	82,95	6,85	99.748	66,4
2	Bantul	69,50	82,70	6,80	132.849	65,8
3	Gunungkidul	70,15	83,45	7,15	125.115	63,6
4	Sleman	71,75	85,70	8,50	242.620	69,8
5	Yogyakarta	72,30	95,15	10,35	245.850	73,4
	DIY	70,95	85,65	7,95	177.775	68,7

*Sumber : Laporan IPM dan IPG Indonesia
Kerjasama BPS, Bappenas, dan UNDP, Tahun 2001*

BAB III

FILOSOFI, VISI DAN MISI PEMBANGUNAN

A. FILOSOFI PEMBANGUNAN

Dasar filosofi pembangunan daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah ***Hamemayu Hayuning Bawono***, sebagai cita-cita luhur untuk menyempurnakan tata nilai kehidupan masyarakat Yogyakarta berdasarkan nilai budaya daerah yang perlu dilestarikan dan dikembangkan.

Hakikat budaya adalah hasil *cipta, karsa dan rasa*, yang diyakini masyarakat sebagai sesuatu yang benar dan indah. Demikian pula budaya daerah DIY, yang diyakini oleh masyarakat DIY sebagai salah satu acuan dalam hidup bermasyarakat, baik ke dalam (*intern*) maupun ke luar (*extern*). Secara filosofis, budaya Jawa, khususnya budaya DIY dapat digunakan sebagai sarana untuk ***Hamemayu Hayuning Bawono***. Ini berarti bahwa budaya tersebut bertujuan untuk mewujudkan masyarakat *ayom, ayem, tata, titi tentrem, karto raharjo*. Dengan perkataan lain, budaya tersebut akan bermuara pada kehidupan masyarakat yang penuh dengan kedamaian, baik ke dalam maupun ke luar.

Perjuangan untuk mensejahterakan masyarakat telah diupayakan dan dilaksanakan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX, dan diteruskan oleh pengganti beliau, tetap dengan semangat ***Hamemayu Hayuning Bawono***, yang artinya kewajiban melindungi, memelihara, serta membina keselamatan dunia dan lebih mementingkan berkarya untuk masyarakat dari pada memenuhi ambisi pribadi. Dunia yang dimaksud inipun mencakup seluruh peri kehidupan dalam skala kecil, yaitu keluarga ataupun masyarakat dan lingkungan hidupnya, dengan mengutamakan dharma bakti untuk kehidupan orang banyak, tidak mementingkan diri sendiri, dengan semangat *sepi ing pamrih rame ing gawe*.

B. VISI PEMBANGUNAN DAERAH

Bertitik tolak dari kondisi dan potensi di atas, maka visi pembangunan daerah, adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Pembangunan Regional sebagai wahana menuju pada kondisi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2020 sebagai pusat Pendidikan, Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka, dalam lingkungan masyarakat yang maju,

mandiri, sejahtera lahir batin didukung oleh nilai-nilai kejuangan dan pemerintah yang bersih dalam pemerintahan yang baik dengan mengembangkan Ketahanan Sosial Budaya dan sumberdaya berkelanjutan”.

Kondisi yang secara bertahap ingin dicapai dengan ditetapkan visi tersebut, antara lain :

1. Terbentuknya citra Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai wilayah pengembangan sosiokultural dan sosioekonomi yang dinamis dan inovatif, berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi maju serta moral masyarakat yang berlandaskan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Tersedianya lapangan kerja yang memberikan penghasilan cukup bagi masyarakat secara adil dan merata.
3. Terciptanya tingkat kesehatan dan gizi masyarakat yang cukup baik, sehingga faktor sumberdaya manusia yang maju, mandiri dan sejahtera dalam lingkungan yang sehat, sehingga dapat diandalkan dalam persaingan global.
4. Terciptanya kondisi yang kondusif bagi partisipasi masyarakat secara luas dalam pembangunan daerah yang bertumpu pada tata nilai budaya serta sumberdaya yang berkelanjutan, dengan mengembangkan kerukunan hidup antar komponen masyarakat, baik antara agama, suku dan budaya.
5. Terciptanya masyarakat yang menghormati dan menegakkan Hak Azasi Manusia (HAM) dalam segala aspek kehidupan.
6. Terlaksananya pelayanan pemerintah yang handal, efisien dan transparan di dalam suasana kehidupan yang aman dan tenteram dalam kerangka otonomi daerah.

C. MISI PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan visi Pembangunan serta kondisi yang diharapkan akan terbentuk secara bertahap tersebut di atas, maka ditetapkan misi pembangunan daerah, sebagai berikut :

1. Menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Pusat Pendidikan Terkemuka di Indonesia yang didukung oleh masyarakat yang berilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) tinggi.
2. Menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Pusat Kebudayaan Terkemuka di Indonesia dengan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai Pusat Budaya, dan didukung oleh pilar-pilar pengembangan budaya dengan masyarakat yang beriman dan bertaqwa (IMTAQ), serta mampu memilih dan menyerap Budaya Modern yang positif dan tetap melestarikan Budaya Daerah
3. Menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Daerah Otonom yang maju dan didukung oleh aparatur yang terpercaya, profesional, transparan dan akuntabel, menuju penyelenggaraan pemerintahan yang baik, demokratis dan berlandaskan pada supremasi hukum dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai wilayah pembangunan yang terpadu, komplementatif dan sinergi antar wilayah dan antar sektor yang efisien dan efektif serta didukung pelibatan secara langsung dan aktif peran masyarakat dalam pembangunan daerah, melalui ketahanan sosial budaya dan ketahanan sumberdaya, yang berwawasan lingkungan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah Tujuan Wisata MICE (*Meeting, Incentive, Conference and Exhibition*) utama di Indonesia dan sekaligus mengembalikan posisi DIY sebagai daerah tujuan wisata kedua setelah Bali, yang didukung posisi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai simpul strategis dan penting, dalam perhubungan dan komunikasi di Pulau Jawa.
6. Menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai wilayah pengembangan industri sedang dan kecil non polutan serta industri rumah tangga modern, yang didukung oleh pengembangan teknologi tepat guna dan sepadan seni daerah, dalam rangka mendukung pengembangan pariwisata daerah dan permintaan pasar global.
7. Menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai wilayah pengembangan pertanian dalam arti luas (Pertanian tanaman pangan, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan), yang didukung oleh berkembangnya perekonomian rakyat yang berkualitas dalam rangka memenuhi tuntutan pasar lokal, regional dan global, dengan produk agrobisnis dan agroindustri yang kompetitif.

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, PENDEKATAN, SASARAN, DAN PERAN PELAKU PEMBANGUNAN

A. ARAH KEBIJAKAN

1. Kondisi Obyektif

Kondisi obyektif dan pengalaman dalam melaksanakan pembangunan di masa lalu di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menunjukkan adanya krisis multidimensional yang sebagian disebabkan oleh rendahnya kinerja Pemerintah Daerah. Hal ini ditandai dengan kurang profesionalnya aparatur pemerintah, rendahnya tingkat pelayanan yang diberikan oleh institusi-institusi pada Pemerintah Daerah, dan dengan terjadinya korupsi-kolusi-nepotisme di jajaran Pemerintah Daerah. Krisis moneter yang berkepanjangan memperparah kondisi obyektif tersebut yang mengakibatkan rendahnya kesejahteraan masyarakat yang ternyata mempunyai implikasi terhadap ketahanan budaya. Penyebab lain dari krisis multidimensional adalah tidak diberdayakannya masyarakat dan pelaku sektor swasta sebagai salah satu pelaku pembangunan, yang dalam pelaksanaan pembangunan di masa lalu sering hanya sebagai obyek pembangunan dan tidak diberi peran sebagaimana mestinya.

Berdasarkan kondisi obyektif tersebut ditentukan arah kebijakan pembangunan DIY, sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Baik dan Bersih (*Good Governance and Clean Government*).
 - b. Memulihkan Ketahanan Ekonomi Daerah.
 - c. Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat dan Ketahanan Budaya.
 - d. Mewujudkan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Pusat Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Terkemuka.
 - e. Memberdayakan Masyarakat.
- ##### **2. Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Baik dan Bersih (*Good Governance and Clean Government*).**

Rendahnya kinerja dan tingkat pelayanan pemerintah daerah mengakibatkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta masih adanya praktek-praktek korupsi-kolusi-nepotisme di lingkup pemerintahan daerah

maupun di lingkup aparat-aparat pemerintah daerah. Jelas ini merupakan hal yang sangat tidak menguntungkan bagi pelaksanaan pembangunan karena sebagai bagian dari pelaku pembangunan semestinya ada saling kepercayaan.

Dengan kenyataan tersebut, maka langkah pertama yang harus dilaksanakan oleh pemerintah sebagai salah satu pelaku pembangunan adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat melalui pewujudan pemerintahan yang baik, dalam pengertian profesional, produktif, efektif-efisien, transparan dan akuntabel serta mampu memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Sedangkan langkah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, dalam pengertian melaksanakan segala peraturan perundangan yang mendasari penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, menindak tegas semua aparat yang melakukan penyimpangan, sekaligus tidak memberikan peluang terhadap praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

Langkah-langkah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui penegakan supremasi hukum, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan institusi pemerintah daerah, peningkatan kemampuan aparatur pemerintahan yang diikuti dengan peningkatan pengawasan baik pengawasan formal fungsional serta pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas aparatur pemerintah.

Peningkatan penyebarluasan dan pemerataan informasi serta peningkatan mutu dan jangkauan informasi akan sangat diperlukan. Langkah ini sekaligus dapat menunjang peningkatan kesadaran, partisipasi, etika dan kemandirian berpolitik dalam rangka mewujudkan kehidupan berpolitik yang demokratis di daerah.

3. Memulihkan Ketahanan Ekonomi Daerah

Pemulihan dan ketahanan ekonomi daerah dalam rangka memperkuat landasan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, diwujudkan melalui pengembangan sistem ekonomi kerakyatan dengan memanfaatkan sumberdaya alam yang berkelanjutan dan sumberdaya pembangunan lainnya secara optimal, yang didukung dengan mengembangkan pemanfaatan tenaga kerja serta meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Upaya jangka pendek dalam pemulihan ekonomi adalah mempertahankan stabilitas ekonomi, menciptakan suasana yang kondusif bagi dunia usaha dan realokasi sumberdaya pembangunan.

Untuk memperkuat landasan pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan dasar demokratisasi ekonomi, dilakukan langkah-langkah; meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, meringankan kemiskinan, menguatkan institusi pasar, meningkatkan ketahanan pangan, mengembangkan agribisnis, meningkatkan pengelolaan potensi kelautan, dan mengembangkan industri berdasarkan keunggulan kompetitif.

Pemanfaatan sumberdaya alam yang dikelola secara optimal dan berkelanjutan, selain untuk memulihkan dan memantapkan ketahanan ekonomi yang berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, dikelola dengan prinsip memelihara kelestarian lingkungan hidup.

4. Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat dan Ketahanan Budaya

Upaya membangun kesejahteraan rakyat dan ketahanan budaya selain merupakan tujuan sekaligus juga merupakan sarana untuk membangun rakyat yang sejahtera, sehat, beriman dan bertaqwa, berbudaya serta dalam suasana kehidupan yang aman dan tertib. Langkah-langkah yang akan dilakukan, adalah :

- b. Merumuskan dan melembagakan kebijakan kependudukan yang mengarah pada upaya peningkatan kualitas, pengendalian kuantitas dan pengarahan persebaran serta mobilitas penduduk, peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar, serta tersedianya data, informasi dan administrasi kependudukan yang berkualitas.
- c. Mendukung terwujudnya Yogyakarta Sehat 2005 dengan paradigma sehat (lebih menekankan kepada preventif dan promotif daripada kuratif), yaitu memberdayakan individu dan masyarakat dalam kesehatan, dengan mewujudkan mutu lingkungan yang sehat, meningkatkan pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan serta mutu gizi masyarakat yang baik, sehingga faktor sumberdaya manusia dapat diandalkan dalam persaingan global.
- d. Meningkatkan dan memantapkan pelaksanaan ajaran agama menuju terciptanya akhlak yang mulia, menumbuhkan dan mewujudkan kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan pelayanan kehidupan beragama, dan mewujudkan kehidupan yang harmonis dalam suasana yang kondusif di tengah keragaman agama, budaya dan etnis masyarakat.

- e. Mewujudkan ketahanan sosial oleh dan untuk masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, tersedianya mekanisme penanganan masalah sosial yang mantap, dan terbinanya kesempatan untuk melaksanakan kewajiban ikut serta dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial.
- f. Meningkatkan kesadaran budaya dan sejarah bangsa dalam rangka, melestarikan warisan budaya daerah sebagai peninggalan para leluhur bangsa yang mempunyai nilai-nilai luhur dan mampu menangkal pengaruh budaya luar/asing dalam rangka mewujudkan jati diri bangsa.
- g. Meningkatkan kemampuan kelembagaan di kalangan masyarakat, menyediakan bantuan bagi warga masyarakat miskin, memberikan dukungan dan mendorong terselenggaranya sistem jaminan sosial, mengembangkan lembaga keswadayaan di masyarakat.
- h. Meningkatkan keamanan, ketertiban dan ketentraman, serta menumbuhkan kesadaran bela negara bagi masyarakat untuk terpeliharanya persatuan dan kesatuan warga masyarakat, meningkatkan peran aktif pemuda dalam pembangunan, mewujudkan pemuda yang berwawasan kebangsaan dan menguasai ilmu pengetahuan serta teknologi, fasilitasi kegiatan olah raga, mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani, serta pengembangan olah raga.

5. Mewujudkan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Pusat Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Terkemuka

Kebijaksanaan untuk mewujudkan DIY sebagai pusat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi terkemuka diarahkan untuk mempertahankan citra DIY sebagai kota pendidikan serta meningkatkannya menjadi kota pendidikan yang terkemuka di Indonesia, melalui upaya-upaya :

- a. Penciptaan iklim belajar yang kondusif bagi masyarakat DIY.
- b. Penyediaan prasarana dan sarana pendidikan yang dapat mendukung pencapaian prestasi belajar yang tinggi.
- c. Penyediaan fasilitas belajar yang memadai bagi calon-calon pelajar yang datang.
- d. Penyebarluasan informasi pendidikan di Yogyakarta.

Tujuan dari arah kebijakan dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi ini adalah untuk mewujudkan masyarakat yang terdidik sehingga mampu bersaing dalam kehidupan bangsa yang makin maju, mewujudkan pemerataan pendidikan bagi semua lapisan masyarakat di semua wilayah dalam berbagai jenjang pendidikan, meningkatkan mutu pendidikan, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, serta meningkatkan pelayanan pendidikan dengan penyempurnaan manajemen sistem pendidikan. Mengembangkan serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung peningkatan kegiatan dunia usaha, menyelaraskan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan nilai-nilai budaya daerah, meningkatkan efisiensi serta efektivitas penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

6. Memberdayakan Masyarakat

Kebijaksanaan pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dan menciptakan suasana yang kondusif sesuai dengan tuntutan pelaksanaan otonomi daerah yang akan dicapai melalui upaya-upaya, sebagai berikut :

- a. Peningkatan kapasitas Pembangunan Daerah untuk mengembangkan ekonomi daerah dan wilayah dilaksanakan melalui pendekatan pembangunan wilayah dengan didasarkan pada keunggulan komparatif dan kompetitif masing-masing daerah, serta pemecahan permasalahan pokok yang dihadapi daerah, dengan selalu melibatkan masyarakat secara langsung dan aktif, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatannya.
- b. Perwujudan pengelolaan kota dan perdesaan yang berkualitas, menciptakan kawasan yang layak huni, berkeadilan dan berbudaya, sehingga mampu meningkatkan produktivitas masyarakat serta mewujudkan pusat pelayanan sosial ekonomi masyarakat dan pusat pemerintahan sesuai aspirasi masyarakat.
- c. Peningkatan ketersediaan rumah dan permukiman yang terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah tetapi layak huni, berbudaya, ramah terhadap lingkungan, yang dibangun sesuai dengan kehendak dan kemampuan masyarakat pengguna, dengan mewujudkan kebijaksanaan penggunaan tanah yang adil.

- d. Penyelenggaraan pelayanan administrasi pertanahan yang tertib, dan mengembangkan kinerja lembaga pengelola pertanahan, didukung dengan penyelenggaraan kegiatan perencanaan tata ruang, penyiapan rencana induk sistem dan perencanaan (*design*) kawasan yang efektif, transparan dan partisipatif. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjamin efektivitas dan efisiensi kegiatan pembangunan secara berkelanjutan.

B. STRATEGI PEMBANGUNAN

Dalam kerangka strategi jangka panjang sebagaimana tercantum dalam POLDAS, ditetapkan strategi jangka menengah dalam upaya pelaksanaan misi pembangunan, sebagai berikut :

1. Menanggulangi pengangguran dan kemiskinan dengan menciptakan lapangan kerja dan usaha bagi masyarakat miskin.
2. Menyiapkan perangkat lunak dan perangkat keras serta aparatur pemerintah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.
3. Menjamin kehandalan ketahanan pangan yang merata kepada segenap masyarakat di wilayah DIY.
4. Mengantisipasi dan menanggulangi dampak bencana baik bersifat fisik maupun non fisik yang terencana dengan baik.

C. PENDEKATAN PEMBANGUNAN DAERAH

Sesuai dengan semangat Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, maka Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang kuat dalam menyusun Kebijakan Pembangunan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, ditempuh pendekatan pembangunan daerah, sebagai berikut :

1. Pendekatan Sejarah/Historis

Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat lahir sebagai hasil perjanjian Giyanti yang diadakan pada tahun 1755. Dengan perjanjian tersebut Kerajaan Mataram dibagi menjadi dua, yaitu Ngayogyakarta Hadiningrat dan Surakarta Hadiningrat.

Semenjak itu, Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat berstatus sebagai negara yang berbentuk kerajaan. Persyaratan sebagai negara telah terpenuhi, yakni kedaulatan, wilayah/teritorial hukum, dan penduduk atau rakyat yang mendukung keberadaan negara tersebut.

Pada tahun 1813 Pemerintah Inggris membentuk Kadipaten Paku Alaman, yang merupakan pemerintahan tersendiri dalam wilayah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat.

Dengan lahirnya negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII menyatakan dengan tegas, bahwa Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Paku Alaman adalah Daerah Istimewa, yang merupakan bagian dari negara Republik Indonesia. Hal ini tertuang dalam Maklumat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII pada tanggal 5 September 1945.

Selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 1945, dikeluarkan Penetapan Presiden yang menyatakan bahwa hubungan antara Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Paku Alaman dengan Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia bersifat langsung, dan kedua Kepala Negeri bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Penetapan diterima pada tanggal 6 September 1945.

Dengan demikian kedudukan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Paku Alaman sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta semakin kuat, karena memiliki dasar hukum yang akurat, yakni Pasal 18 UUD 1945, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950, dan Undang-undang No. 22 Tahun 1999, khususnya pasal 122.

Demi kepastian hukum, perlu ditetapkan substansi keistimewaan bagi Daerah Istimewa Yogyakarta, baik berdasarkan faktor historis, kultural, sosiologis, politis maupun yuridis, keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi 4 (empat) hal, yaitu :

- a. Kelembagaan pemerintah.
- b. Aparat pemerintah, khususnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- c. Pertanahan.
- d. Kebudayaan.

2. Pendekatan Kewilayahan

Sebagai pengembangan keruangan yang mengatur hubungan keserasian, laju pertumbuhan antar daerah, keserasian antara pendayagunaan sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan serta teknologi, dengan tetap mengacu pada pembangunan yang berwawasan lingkungan, dan agar pembangunan lebih terarah serta terfokus. Pendekatan ini adalah usaha danantisipasi dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, yang mengarahkan pada perkuatan perencanaan di daerah dalam rangka otonomi, sebagai ganti dari sistem yang sentralistik. Apabila pendekatan pada masa lalu dengan sistem sentralistik sektoral, maka pada saat ini justru, dengan melihat kondisi obyektif dan potensi riil serta aspirasi masyarakat setempat, yang diantisipasi dengan berbagai program terpadu dan tersinergi di wilayah tersebut untuk menjawab berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Di dalam program terpadu dan tersinergi, terdiri dari sektor utama dan sektor penunjang sesuai dengan kebutuhan wilayah tersebut, sedangkan alokasi proyek dalam sektor adalah jabaran dari konsekwensi logis pelaksanaan program tersebut. Untuk DIY, wilayah pengembangan dibagi menjadi 4 (empat) wilayah pengembangan, yaitu :

a. Wilayah Barat (Pegunungan Menoreh)

Wilayah ini dikembangkan melalui program terpadu yang dapat mendorong percepatan pembangunan wilayah dengan penekanan pada peningkatan prasarana wilayah serta peningkatan ekonomi kerakyatan.

b. Wilayah Tengah (Iereng Merapi sampai wilayah pesisir Pantai Selatan)

Wilayah pusat Perkotaan Yogyakarta dengan kawasan Malioboro dan Kraton, serta kawasan-kawasan tumbuh cepat dan strategis. Penekanan pengembangan program dalam rangka membuat alternatif pusat kegiatan yang dapat menarik kepadatan kegiatan ke luar dari pusat perkotaan, antara lain dengan menumbuhkan satelit-satelit di sekitar perkotaan Yogyakarta, sedangkan untuk menyatukan wilayah Tengah serta menghubungkan wilayah antar satelit, dengan daerah belakang (*hinter land*), diperlukan pembukaan aksesibilitas dalam bentuk jalan lingkar luar (*outer ring road*).

c. Wilayah Timur (Pegunungan Seribu)

Wilayah ini dikembangkan melalui program terpadu yang dapat mendorong percepatan pembangunan wilayah dengan penekanan pada pengelolaan sungai bawah tanah, air tanah dan prasarana perhubungan.

d. Wilayah Pesisir Selatan

Wilayah pesisir selatan di DIY terbentang sepanjang 110 km mulai dari Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Bantul, sampai dengan Kabupaten Kulon Progo. Wilayah ini memiliki potensi sumberdaya alam yang sangat kaya dan beragam, baik sumberdaya yang dapat diperbaharui maupun sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui. Dengan makin berkembangnya aksesibilitas dan fasilitas di wilayah pesisir selatan seperti listrik, dan transportasi, maka potensi pesisir ini akan menjadi tumpuan harapan bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu dalam pembangunan daerah, potensi pesisir di wilayah bagian selatan DIY diarahkan untuk mendukung pertumbuhan dan pemulihan ekonomi daerah, antara lain melalui pengembangan pariwisata, perikanan, dan pertanian.

3. Pendekatan Lingkungan Hidup/Ekologi

Pendekatan ekologi menjadi penting artinya dan menjadi perhatian ketika manusia menyadari terjadinya akibat-akibat sampingan dari aktifitas-aktifitas yang dilakukan oleh manusia. Pengaruh ini bersifat timbal balik, yaitu lingkungan yang dipengaruhi oleh perbuatan manusia kembali memberikan akibat-akibat yang juga mempengaruhi diri manusia itu sendiri. Unsur-unsur yang saling mempengaruhi itu terletak dalam suatu ekosistem, yang satu sama lain saling bergantung dan membutuhkan. Jadi ibarat satu mata rantai yang apabila salah satu bagiannya terputus akan menimbulkan masalah lingkungan hidup. Masalah lingkungan hidup timbul akibat interaksi manusia dalam ekosistem sebagai wujud dorongan kebutuhan hidup baik dalam subsistem maupun tingkat yang lebih tinggi, baik dengan menggunakan teknologi tradisional maupun teknologi tinggi.

Karena masalah lingkungan merupakan masalah yang cukup kompleks yang melibatkan cukup banyak unsur-unsur kelompok dalam masyarakat maka selayaknya penanganan masalah lingkungan tidak hanya terbatas oleh pemerintah saja, tetapi juga oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu maka pendekatan lingkungan hidup/ekologi sangat dibutuhkan sebagai landasan pembangunan daerah.

4. Pendekatan Kelembagaan

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan pengembangan potensi DIY, serta untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah, maka dilakukan pendekatan :

- a. Pengembangan kemitraan dengan Lembaga-lembaga/Badan-badan baik pemerintah, swasta dan masyarakat.
- b. Evaluasi kinerja kelembagaan dilaksanakan untuk menata ulang kelembagaan atau reorganisasi Pemerintah Daerah diikuti dengan penataan manajemen atau ketatalaksanaan, yang disesuaikan dengan tuntutan ketugasan berdasarkan kewenangan yang ada, dalam rangka efisiensi dan tuntutan pelayanan publik/masyarakat yang optimal.
- c. Peningkatan pelayanan pada masyarakat dalam rangka pewujudan pemerintahan daerah yang baik dan bersih yang didukung aparat pemerintah yang profesional, transparan dan akuntabel.
- d. Penyempurnaan dan pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah.
- e. Pembinaan dan pengembangan Badan-badan Usaha Milik Daerah.

5. Pendekatan Ekonomi

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah yang pada gilirannya akan meningkatkan ketahanan ekonomi daerah dan rakyat, dilakukan pendekatan :

- a. Pengembangan produk/komoditi unggulan daerah yang berorientasi pasar lokal, regional maupun global.
- b. Pengembangan usaha-usaha ekonomi produktif, usaha kecil, menengah dan koperasi dalam rangka pengembangan ekonomi kerakyatan.
- c. Penggalan dan pengembangan potensi sumber Pendapatan Asli Daerah dan mengoptimalkan asset daerah.
- d. Mempertajam alokasi anggaran pembangunan dengan pelaksanaan yang makin efisien dan efektif, dilandasi konsep yang jelas dan transparan.
- e. Memberikan insentif dan disinsentif kepada investor serta pelaku ekonomi di daerah.

6. Pendekatan Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia pada dasarnya adalah sebagai subyek pembangunan sekaligus sebagai obyek dan penerima manfaat hasil pembangunan. Oleh karena itu dalam pendekatan sumberdaya manusia, dilakukan upaya-upaya :

- a. Peningkatan iman dan taqwa dalam rangka pembentukan sikap dan perilaku yang berakhlak dan bermoral.
- b. Peningkatan kemampuan, profesionalisme dan produktivitas kerja melalui berbagai pendidikan dan pelatihan ketrampilan.
- c. Peningkatan derajat kesehatan, baik kesehatan fisik maupun mental bagi segenap warga masyarakat.
- d. Pembinaan budi pekerti untuk mewujudkan manusia yang berbudaya dan berkepribadian yang mencerminkan jati diri bangsa.

7. Pendekatan Prasarana dan Sarana

Untuk mendukung keberhasilan tercapainya visi-misi pembangunan daerah, diperlukan prasarana dan sarana pendukung yang memadai, baik yang bersifat fisik seperti fasilitas pelayanan sosial, ekonomi, budaya, dan keamanan, maupun non fisik seperti komitmen di antara para pihak terkait (*stakeholders*), penciptaan suasana aman, tenteram dan damai.

D. SASARAN PEMBANGUNAN

Sasaran pembangunan adalah perkembangan dan pertumbuhan (*growth*) berbagai wilayah/kawasan, masyarakat dan berbagai sektor/subsektor, pemerataan kesejahteraan dan kualitas hidup serta kehidupan, kelestarian (*sustainability*) sumberdaya, lingkungan hidup dan usaha.

Berdasarkan analisis dengan menggunakan pendekatan kekuatan-kelemahan-peluang-ancaman (*strength, weakness, opportunity and threats, SWOT*) yang secara parsial telah dilakukan pada beberapa penelitian mengenai pengembangan kawasan dan pembangunan wilayah, maka disusun sasaran pembangunan yang setelah disesuaikan dengan arah kebijakan pembangunan, strategi pembangunan dan pendekatan pembangunan, maka sasaran pembangunan dalam kurun tahun 2001 – 2005 akan terdiri dari 6 (enam) program prioritas, yaitu :

1. Terwujudnya Pemerintahan Daerah yang Baik dan Bersih.
2. Tercapainya Pemulihan dan Ketahanan Ekonomi Daerah.
3. Tercapainya Kesejahteraan Masyarakat.
4. Tercapainya Ketahanan Budaya.
5. Terwujudnya Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Pusat Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Terkemuka.
6. Terberdayakannya Masyarakat.

Dipisahkannya Pencapaian Ketahanan Budaya dari Pencapaian Kesejahteraan Masyarakat adalah untuk mempertajam prioritas pembangunan.

1. Terwujudnya Pemerintahan Daerah yang Baik dan Bersih

Agenda reformasi menuntut terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintah yang bersih (*clean government*), suatu pemerintahan yang bebas dari korupsi-kolusi-nepotisme, mampu memberikan pelayanan prima kepada publik, dipercaya oleh masyarakat, adanya partisipasi aktif dari masyarakat.

Untuk mencapai sasaran ini akan diperlukan pembangunan dalam bidang politik, penegakan hukum dan hak asasi manusia dan pembinaan aparatur negara yang didukung dengan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

2. Tercapainya Pemulihan dan Ketahanan Ekonomi Daerah

Sasaran yang ingin dicapai adalah pulihnya ekonomi secara cepat yang ditandai, antara lain dengan terjaminnya kebutuhan bahan pokok dengan harga terjangkau, menurunnya jumlah pengangguran dan keluarga prasejahtera. Dalam dunia usaha diharapkan adanya peningkatan daya saing dan efisiensi, makin mantapnya usaha kecil, menengah dan koperasi sehingga mampu menembus pasar regional dan global.

Salah satu upaya pencapaian pemulihan dan ketahanan ekonomi daerah, pendekatan kecamatan sebagai pusat pertumbuhan diharapkan mampu mendorong tumbuhnya kemampuan masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya dengan didukung oleh berbagai fasilitas yang lebih baik dari aparatur pemerintah, baik di tingkat propinsi, kabupaten, maupun di kecamatan serta dukungan partisipasi dunia usaha dalam mengelola potensi sumberdaya yang ada.

Pencapaian sasaran tersebut akan mensyaratkan adanya pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan secara berkelanjutan, pertumbuhan perekonomian di atas landasan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, peningkatan iklim usaha didukung dengan kuatnya institusi pasar dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, berkembangnya industri unggulan yang kompetitif pada institusi pasar yang makin menguat.

Pembangunan sektor pertanian harus diarahkan kepada upaya mendukung ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani. Selain itu juga disyaratkan adanya pembangunan di sektor-sektor lain seperti ketenagakerjaan, perdagangan, transportasi, pertambangan dan pariwisata serta peningkatan profesionalisme BUMD yang kesemuanya diarahkan untuk meningkatkan PAD.

3. Tercapainya Kesejahteraan Masyarakat

Pengertian tercapainya kesejahteraan masyarakat tidak hanya diukur dari indikator ekonomi saja tetapi juga dari segi sosial-budaya, antara lain dengan terkendalinya pertumbuhan penduduk, peningkatan kualitas kehidupan keluarga, terwujudnya sumberdaya manusia yang berpendidikan dan berkualitas tinggi terciptanya perilaku sehat dan keberdayaan individu dan masyarakat dalam bidang kesehatan, meningkatnya potensi dan keberdayaan masyarakat serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang diiringi dengan menurunnya masalah sosial, peningkatan mutu pelayanan dan tersedianya prasarana dan sarana serta kemudahan mengakses pelayanan sosial dan pelayanan umum. Masyarakat juga harus terlindungi dalam suatu sistem manajemen perlindungan masyarakat yang andal dan mantap.

Dalam bidang kesehatan, pencapaian Yogyakarta Sehat 2005 merupakan sasaran yang hendak dicapai untuk menunjang kesejahteraan masyarakat. Pengertian Yogyakarta Sehat 2005 adalah bukan berarti Yogyakarta bebas penyakit pada tahun 2005, tetapi pada tahun tersebut sebagian besar masyarakat Yogyakarta telah memahami serta melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), ikut menjaga dan meningkatkan lingkungan sehat serta aktif berperan dalam memecahkan masalah pembiayaan kesehatan melalui sistem Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM).

4. Tercapainya Ketahanan Budaya

Tercapainya ketahanan budaya mensyaratkan adanya upaya-upaya peningkatan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, peningkatan kerukunan hidup antar umat beragama, peningkatan kesadaran sejarah bangsa dan ketahanan budaya terhadap budaya luar yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa serta pemberdayaan perempuan dalam segala bidang dan juga munculnya peran aktif pemuda dalam pembangunan.

5. Terwujudnya Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Pusat Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Terkemuka

Arah kebijakan ini didasarkan kepada tersedianya potensi sumberdaya manusia, sumberdaya alam, sumberdaya buatan serta popularitas; regional maupun global; Yogyakarta sebagai tempat untuk menuntut ilmu.

Ada 3 (tiga) pemikiran yang akan dicapai dari arah kebijakan ini, yaitu :

- a. Dihasilkannya tenaga-tenaga terdidik yang berkualitas dan mampu berperan pada aras regional maupun global.
- b. Meningkatnya intelektualitas masyarakat yang berdampak kepada tercapainya situasi keamanan dan ketertiban.
- c. Meningkatnya pendapatan masyarakat dari faktor jasa dan penyediaan kebutuhan-kebutuhan pendidikan.

Perwujudan ini hanya akan tercapai dengan adanya tekad dari *stakeholders* pembangunan untuk aktif menciptakan suasana belajar yang kondusif dan kompetitif, dengan penyediaan prasarana dan sarana pendidikan yang memadai, peningkatan kemampuan SDM bidang pendidikan, dan terinformasikannya ketersediaan jasa pendidikan yang berkualitas di Yogyakarta.

6. Terberdayakannya Masyarakat

Dengan terberdayakannya masyarakat maka diharapkan bahwa penyelenggaraan pembangunan daerah akan menjadi efektif dan efisien, hasil pembangunan juga akan dapat dimanfaatkan secara optimal. Untuk itu akan diperlukan upaya-upaya pendidikan dan pelatihan, pemberian kesempatan dan peran lebih bagi masyarakat untuk ikut menentukan kebijakan dan penyelenggaraan pembangunan, penguatan organisasi masyarakat serta peningkatan kemampuan berswadaya.

Termasuk dalam sasaran ini adalah meningkatnya peran perempuan di DIY melalui pengarusutamaan *gender*, sehingga diharapkan nantinya tidak ada lagi diskriminasi terhadap perempuan.

E. PRIORITAS PENCAPAIAN SASARAN PEMBANGUNAN

Ada 6 (enam) sasaran pembangunan yang akan dicapai, yaitu terwujudnya pemerintahan daerah yang baik dan bersih; tercapainya pemulihan dan ketahanan ekonomi daerah; tercapainya kesejahteraan masyarakat; tercapainya ketahanan budaya; dan terwujudnya Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pusat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi terkemuka; serta terberdayakannya masyarakat; mempunyai skala prioritas yang sama besar, namun sesuai tingkat kepentingannya pada setiap tahun pelaksanaan (mulai dari tahun pertama sampai dengan tahun kelima) akan berbeda-beda proporsinya. Sedangkan sasaran keenam yaitu terberdayakannya masyarakat, lebih merupakan cara pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian kelima sasaran yang lainnya.

Dengan pemikiran tersebut, maka disusun suatu skala prioritas untuk masing-masing sasaran pembangunan untuk setiap tahun pelaksanaan, sebagai berikut :

TAHUN I :

1. Tercapainya Pemulihan dan Ketahanan Ekonomi Daerah, dengan titik berat pada pemulihan ekonomi daerah;
2. Terwujudnya Pemerintahan Daerah yang Baik dan Bersih, dengan titik berat pada penataan kelembagaan dan pelaksanaan otonomi daerah;
3. Tercapainya Kesejahteraan Masyarakat, dengan titik berat pada penyediaan lapangan kerja dan peningkatan peran perempuan;
4. Tercapainya Ketahanan Budaya, dengan titik berat pada pengembangan sikap kritis masyarakat terhadap nilai-nilai budaya (internal maupun eksternal);
5. Terberdayakannya Masyarakat, dengan titik berat pada perumusan peran masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan.
6. Terwujudnya Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Pusat Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Terkemuka dengan titik berat pada penciptaan iklim belajar yang kondusif bagi masyarakat DIY.

TAHUN II :

1. Tercapainya Pemulihan dan Ketahanan Ekonomi Daerah, dengan proporsi seimbang antara pemulihan ekonomi dan pementapan ekonomi daerah;
2. Terwujudnya Pemerintahan Daerah yang Baik dan Bersih, dengan titik berat pada pembinaan aparatur pemerintahan (transformasi birokrasi) dan peningkatan supremasi hukum;
3. Tercapainya Kesejahteraan Masyarakat, dengan titik berat pada pelaksanaan program-program kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana;

4. Tercapainya Ketahanan Budaya, dengan titik berat pada pembinaan kebudayaan daerah;
5. Terberdayakannya Masyarakat, dengan titik berat pada pemberian peran yang lebih besar kepada masyarakat dan sektor swasta dalam penyusunan program pembangunan.
6. Terwujudnya Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Pusat Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Terkemuka dengan titik berat pada penyediaan prasarana dan sarana pendidikan yang dapat mendukung pencapaian prestasi belajar yang tinggi.

TAHUN III :

1. Tercapainya Pemulihan dan Ketahanan Ekonomi Daerah, dengan titik berat pada pementapan ekonomi daerah;
2. Tercapainya Kesejahteraan Masyarakat, dengan titik berat pada peningkatan kesehatan, kualitas sumberdaya manusia melalui pendidikan dan penerapan ilmu dan teknologi;
3. Terwujudnya Pemerintahan Daerah yang Baik dan Bersih, dengan titik berat pada pementapan keamanan dan ketertiban serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan;
4. Tercapainya Ketahanan Budaya, dengan titik berat pada penanganan cagar budaya dan desa budaya serta peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana kebudayaan;
5. Terberdayakannya Masyarakat, dengan titik berat pada pemberian peran yang lebih besar kepada masyarakat dan sektor swasta dalam pelaksanaan program pembangunan.
6. Terwujudnya Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Pusat Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Terkemuka dengan titik berat pada penyediaan fasilitas belajar yang memadai bagi calon-calon pelajar yang datang.

TAHUN IV :

1. Tercapainya Kesejahteraan Masyarakat, dengan titik berat pada peningkatan kesejahteraan keluarga dan peningkatan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan umum;
2. Tercapainya Pemulihan dan Ketahanan Ekonomi Daerah, dengan titik berat pada pengembangan ekonomi daerah;
3. Terberdayakannya Masyarakat, dengan titik berat pada pemberian peran yang lebih besar kepada masyarakat dan sektor swasta sebagai pelaksana program pembangunan;

4. Terwujudnya Pemerintahan Daerah yang Baik dan Bersih, dengan titik berat pada peningkatan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan melalui penerapan telematika dan *e-government*;
5. Tercapainya Ketahanan Budaya, dengan titik berat pada pelestarian apresiasi nilai kesenian dan kebudayaan dan pengembangan kesenian dan kebudayaan serta wisata budaya.
6. Terwujudnya Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Pusat Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Terkemuka dengan titik berat pada penyebaran informasi pendidikan di Yogyakarta.

TAHUN V :

Diasumsikan bahwa semua sasaran pembangunan telah tercapai, sehingga pada program dan kegiatan pada Tahun V akan dititikberatkan kepada pemantapan hasil yang telah dicapai dan peletakan dasar-dasar bagi Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) tahun berikutnya.

F. PERAN PELAKU PEMBANGUNAN

Pengalaman menunjukkan bahwa salah satu penyebab dari kurang berhasilnya pembangunan selama ini adalah karena terlalu besarnya dominasi pemerintah dalam pelaksanaan program pembangunan. Kata-kata “*masyarakat sebagai obyek sekaligus subyek pembangunan*” ternyata hanya merupakan slogan dan jargon politik saja, tidak pernah diterapkan secara konsisten.

Mengacu kepada pengalaman tersebut, dalam pembangunan daerah di Propinsi DIY, peran masing-masing pelaku pembangunan yang dikenal dengan 3 (tiga) *stakeholders* akan ditentukan, ditata kembali, dan diperjelas pembagian peranannya. Adapun ketiga pilar tersebut, adalah :

Penyelenggara Pemerintahan Daerah :

Penyelenggara Pemerintahan Daerah meliputi, Pemerintah Propinsi DIY (Lembaga Teknis Daerah, Dinas Daerah, Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan) dan Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi DIY (DPR-DIY).

Masyarakat :

Pengertian masyarakat ini bersifat luas yaitu masyarakat umum yang berada di DIY, dan agar dibedakan dengan pengertian penduduk yang lebih diartikan sebagai masyarakat yang secara administratif merupakan penduduk dari suatu daerah administrasi pemerintahan (propinsi, kabupaten/kota). Termasuk dalam pengertian ini adalah kelompok akademisi/Lembaga Pendidikan Tinggi di DIY yang perannya

sangat menonjol, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Kemasyarakatan (ormas).

Pelaku Sektor Swasta :

Pengertian “pelaku sektor swasta” lebih ditekankan kepada para pengusaha atau pelaku bisnis pada sektor swasta yang dalam kenyataannya mempunyai andil yang sangat besar dalam menggerakkan roda perekonomian. Pelaku sektor swasta ini tidak dibatasi oleh domisili yang bersangkutan, namun semua pelaku kegiatan usaha/bisnis yang bidang usahanya berada di DIY atau mempunyai pengaruh terhadap perekonomian DIY.

1. Peran Pemerintahan Daerah

Dalam pembangunan daerah, Pemerintah Propinsi DIY melaksanakan peran penentuan kebijakan pembangunan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, pengaturan pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan pembangunan, fasilitator dan akomodator bagi pelaksanaan pembangunan, penyediaan dana dan pengawasan struktural maupun fungsional.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi DIY melaksanakan fungsi *budgeting*, dan legislasi, serta pengawasan terhadap eksekutif mengenai kebijakan pembangunan.

2. Peran Masyarakat

Sebagai kelompok yang nantinya menerima manfaat hasil pembangunan dan akan mengelolanya, maka masyarakat diharapkan ikutserta berperan untuk menyampaikan masukan pada penyusunan kebijakan dan partisipasi dalam proses perencanaan pembangunan. Dari hasil tersusunnya kebijakan dan perencanaan dimaksud maka masyarakat jika memungkinkan dapat berperanserta melaksanakan/mengelola proses pembangunan dan dimungkinkan pula untuk memberikan kontrol dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, para akademisi/pendidikan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi kemasyarakatan (ormas), diharapkan juga melaksanakan terobosan-terobosan dalam melaksanakan program pembangunan dengan mentransfer teknologi tepatguna, tepatsasaran serta tepatmanfaat, sesuai dengan potensi yang ada di perdesaan untuk mempercepat peningkatan ekonomi kerakyatan.

3. Peran Pelaku Sektor Swasta

Pelaku sektor swasta akan mempunyai peranan yang hampir sama dengan peranan masyarakat, kecuali bahwa pendanaan pembangunan akan berwujud penanaman modal atau investasi serta ikut berperan secara aktif dalam peningkatan ekonomi kerakyatan. Pelaku sektor swasta juga diharapkan ikut secara aktif dalam upaya-upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia untuk mewujudkan visi DIY sebagai Kota Pendidikan, Kebudayaan dan Tujuan Wisata.

G. PERGESERAN PERAN PEMERINTAH

Mengacu kepada pengalaman dalam penyelenggaraan pemerintahan selama ini serta dengan terjadinya pergeseran paradigma yang berlangsung di masyarakat maka jelas tidak akan terhindarkan adanya perubahan peran dari Pemerintah Daerah. Perubahan penyelenggaraan pemerintahan tersebut yang semula sebagai “pengayuh sekaligus pengemudi biduk” sekarang berfungsi sebagai “pengemudi biduk”, dengan kata lain pemerintahan saat ini lebih berorientasi pada *steering*, walaupun tidak mencakup keseluruhan urusan, karena pada kenyataannya tidak semua urusan dapat diselenggarakan oleh masyarakat. Dalam konteks pelaksanaan (*rowing*), pemerintah lebih berorientasi untuk memberikan kesempatan ataupun peran kepada masyarakat serta dunia usaha.

Agar dapat berlangsung dengan baik, ada dua kelompok yang perlu dipersiapkan untuk menerima pergeseran ini. Yang pertama adalah kelompok birokrat, yang harus dipersiapkan untuk merubah pola pikir, tatacara kerja, perilaku dan etos kerja (transformasi birokrasi), yang pada muaranya diharapkan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara prima. Kelompok kedua adalah masyarakat dan pelaku sektor swasta yang perlu dipersiapkan agar mampu menerima peran yang lebih besar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa mendatang.

BAB V

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan 6 (enam) sasaran pembangunan daerah, maka disusun program pembangunan daerah yang merupakan pengelompokan program-program. Pelaksanaan program pembangunan daerah merupakan jawaban atas kendala dan permasalahan yang harus dihadapi selama lima tahun mendatang pada kurun tahun 2001 – 2005.

Program pembangunan daerah bersifat lintas ruang, dalam arti tidak didasarkan atas batas-batas keruangan, baik batas administrasi pemerintahan maupun batas tata ruang. Dengan kata lain, program-program pembangunan ini akan berlaku umum dan menyeluruh. Umum dalam arti program pembangunan bagi seluruh pelaku pembangunan, dan menyeluruh dalam arti tidak dibatasi oleh wilayah administrasi pemerintahan.

A. PEWUJUDAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BAIK DAN BERSIH

Program pembangunan untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang baik dan bersih akan terdiri dari beberapa program yang secara bersama-sama (terpadu dan sinergis) akan menjamin tercapainya sasaran pembangunan tersebut.

Uraian terhadap program terdiri atas arah kebijakan dan ringkasan program yang diusulkan untuk dilaksanakan.

1. Pelaksanaan Otonomi Daerah

a. Arah Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dari penyelenggaraan otonomi daerah, perlu ditentukan kebijakan sebagai berikut :

- 1) Memberdayakan masyarakat dan aparat pemerintah daerah melalui pendidikan, pelatihan dan pembinaan yang intensif, dengan mengedepankan etika dan moral.

- 2) Meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui pengembangan dan pendayagunaan potensi-potensi ekonomi daerah secara maksimal.
- 3) Mengembangkan struktur organisasi pemerintah daerah sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan daerah
- 4) Meningkatkan peranserta dan partisipasi masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan
- 5) Meningkatkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui penyediaan tenaga ahli yang diperbantukan, peningkatan mekanisme dan kualitas masukan data/informasi untuk pengambilan keputusan legislasi dan pengawasan kepada pihak eksekutif secara efektif.

b. Program

Untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang baik dan bersih maka disusun program-program, sebagai berikut :

- 1) Peningkatan kemampuan aparat pemerintah daerah dan masyarakat.
- 2) Penataan pengelolaan manajemen keuangan daerah, baik dalam rangka peningkatan penerimaan daerah maupun pengelolaan pembelanjaan yang mengarah pada azas efisien dan efektif.
- 3) Penyempurnaan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah daerah untuk menjamin efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat.
- 4) Peningkatan peran dan fungsi DPRD agar kualitas pembuatan legislasi, penampung aspirasi masyarakat dan mekanisme pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, dapat berjalan secara optimal.

2. Penegakan Supremasi Hukum

a. Arah Kebijakan

Penegakan supremasi hukum diarahkan, untuk :

- 1) Mengkaji dan memperbaharui peraturan perundangan yang ada, disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, melalui pemberdayaan lembaga peradilan dan lembaga hukum.
- 2) Menyelenggarakan penyuluhan dan penegakan hukum serta hak asasi manusia yang akan dilakukan bersama dengan para pelaku pembangunan.
- 3) Menyediakan prasarana dan sarana hukum yang memadai.
- 4) Menyelenggarakan pembinaan aparat hukum.

b. Program

- 1) Pengkajian dan penerbitan peraturan perundangan yang sesuai dengan kondisi dan situasi saat ini serta memenuhi kebutuhan masyarakat.
- 2) Pemberdayaan lembaga peradilan dan lembaga hukum.
- 3) Pembinaan prasarana dan sarana hukum.
- 4) Penyuluhan, penerapan dan penegakan hukum dan hak asasi manusia yang dilaksanakan secara bersama-sama dengan para pelaku pembangunan untuk lebih meningkatkan efektivitas penyadaran hukum bagi masyarakat luas.

3. Pendayagunaan Aparatur Negara dan Pengawasan

a. Arah Kebijakan

Pendayagunaan aparatur negara dan pengawasan diarahkan, untuk :

- 1) Mendayagunakan aparatur negara dan pengawasan dalam bentuk peningkatan kualitas melalui pendidikan pelatihan, peningkatan profesionalisme.
- 2) Menerapkan sistem penghargaan (*merit system*), penerapan perencanaan karier (*carrier planning*) yang diikuti dengan peningkatan daya-guna kelembagaan dan tatalaksana aparatur negara, serta pemberian sanksi (*punishment*) bagi aparat yang melakukan pelanggaran.
- 3) Memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme untuk mencapai pemerintahan yang baik dan bersih.
- 4) Meningkatkan peranserta masyarakat dalam pengawasan yang dilakukan secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme di kalangan aparatur negara.

b. Program

Program pendayagunaan aparatur negara dan pengawasan diprioritaskan, kepada :

- 1) Peningkatan kemampuan aparatur melalui peningkatan kualitas, profesionalisme dan keterampilan agar dapat melaksanakan tugas-tugasnya secara optimal, efektif dan efisien.
- 2) Pemberian insentif dan penghargaan bagi aparatur yang berprestasi dan pemberian sanksi bagi aparatur yang melakukan pelanggaran.
- 3) Penyempurnaan kelembagaan dan ketatalaksanaan.

- 4) Pelatihan transformasi birokrasi agar aparatur pemerintah mampu memberikan pelayanan yang lebih baik, cepat, tepat, murah dan memuaskan masyarakat.
- 5) Peningkatan pengawasan terhadap aparatur pemerintah baik yang bersifat struktural, fungsional, maupun dalam bentuk kontrol sosial dari masyarakat.

4. Pembangunan Politik

a. Arah Kebijakan

Menciptakan tekad bersama sebagai upaya antisipasi adanya paradigma baru dalam bidang politik, sehingga dapat ditentukan kebijakan yang mengarah kepada peningkatan kesadaran, partisipasi dan mengedepankan moral dan etika berpolitik bagi para pelaku pembangunan seiring dengan peningkatan kemandirian partai politik dan pemantapan kestabilan politik.

b. Program

- 1) Pengembangan etika, moral, dan budaya politik yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berpolitik menuju kepada pemantapan kesatuan dan persatuan bangsa.
- 2) Peningkatan kualitas peranan dari organisasi-organisasi politik dalam pembangunan politik.

5. Pembangunan Ketenteraman dan Ketertiban

a. Arah Kebijakan

Kebijakan dalam upaya pencapaian keamanan, ketenteraman dan ketertiban, diarahkan untuk :

- 1) Meningkatkan pembinaan terhadap sistem ketenteraman dan ketertiban masyarakat dimana masyarakat dan pelaku sektor swasta sendiri yang akan menangani upaya pencapaian tersebut.
- 2) Memfasilitasi kebutuhan prasarana dan sarana ketenteraman dan ketertiban bagi Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).
- 3) Mewujudkan sistem manajemen perlindungan masyarakat yang mandiri dan mantap yang didukung oleh terbinanya sistem dan mekanisme kerja yang berdayaguna dan berhasilguna di antara segenap komponen pelaku pembangunan di setiap lapisan masyarakat.

b. Program

Program pewujudan ketenteraman dan ketertiban diarahkan pada upaya pembentukan sistem dan satuan perlindungan masyarakat yang berkemampuan untuk menangani gangguan ketenteraman, ketertiban dan pelanggaran hukum lainnya sesuai dengan kewenangannya dan dengan berlandaskan kepada peraturan perundangan yang berlaku.

6. Komunikasi, Informasi dan Media Massa

a. Arah Kebijakan

Pembangunan sistem komunikasi, informasi dan media massa diarahkan kepada keterbukaan yang bertanggungjawab dan profesional diwujudkan antara lain dalam penyampaian pertanggungjawaban kinerja pemerintah kepada lembaga legislatif dan masyarakat. Kebebasan pers akan didukung dengan profesionalisme, penghormatan terhadap etika pers dan penegakan hukum dalam bidang pers.

b. Program

Program pembangunan komunikasi, informasi dan media massa diwujudkan dalam bentuk :

- 1) Pemberdayaan Komunikasi, Informasi dan Media.
- 2) Peningkatan Profesionalisme Pers dan Media Massa.
- 3) Pengembangan Sumberdaya Manusia dalam Bidang Informasi dan Media Massa.
- 4) Peningkatan Prasarana dan Sarana Komunikasi dan Informasi.

7. Penerapan *E-Government*

a. Arah Kebijakan

Telekomunikasi dan informatika berbasis Teknologi Informasi diterapkan dalam upaya, untuk :

- 1) Meningkatkan pelayanan penyediaan data dan informasi kepada masyarakat.
- 2) Transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- 3) Pemasaran potensi daerah.

- 4) Perluasan akses masyarakat terhadap jaringan informasi internasional (*internet*).
- 5) Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

b. Program

Program pembangunan telematika diwujudkan, melalui :

- 1) Pemberian ijin dan kemudahan bagi para *Internet Service Provider* (ISP) untuk beroperasi di DIY dalam bidang jasa informatika.
- 2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dalam bidang telematika bagi aparatur pemerintahan maupun masyarakat dan pelaku sektor swasta agar tersedia SDM yang berkualitas dan profesional dalam penanganan telematika.
- 3) Penyiapan infrastruktur perangkat keras dan jaringan telematika pada setiap aras (*level*) pemerintahan diikuti dengan penyiapan standar penting dalam *level* struktural (format data, format hubungan struktural dan sebagainya).
- 4) Penguatan lembaga pengelola data/informasi pada Pemerintah DIY (Badan Informasi Daerah).
- 5) Penerapan *e-government* berbasis Teknologi Informasi pada Pemerintah DIY.

B. PEMULIHAN KETAHANAN EKONOMI DAERAH

1. Industri

a. Arah Kebijakan

Dalam pembangunan industri ditempuh arah kebijakan sebagai berikut :

- 1) Pengembangan industri rumah tangga, industri kecil dan menengah yang dilakukan melalui pola kemitraan usaha dengan usaha besar serta dunia usaha dan lembaga swadaya masyarakat dengan prinsip saling menguntungkan, yang menyangkut penyertaan modal, kerjasama pemasaran, pembimbingan dan alih teknologi produksi, peningkatan keahlian dan keterampilan serta kelancaran pengadaan bahan baku dan bahan penolong. Selain itu, pengembangan industri kecil, terutama industri kerajinan dan rumah tangga serta industri perdesaan, juga dilaksanakan melalui pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUB), pengembangan sentra industri dan koperasi industri, penyediaan prasarana

dan sarana pendukung, baik yang berupa prasarana kelembagaan dan prasarana fisik, penyediaan fasilitas pendidikan dan pelatihan.

- 2) Peningkatan kemampuan teknologi industri dengan beberapa kegiatan pokok yang akan dilaksanakan, antara lain adalah pengembangan teknologi produk, teknologi manufaktur, pengembangan rancangbangun dan perekayasaan industri, pengembangan teknologi industri yang berwawasan kelestarian lingkungan, alih teknologi, standardisasi dan sertifikasi.
- 3) Penataan struktur industri diarahkan pada perluasan dan penguatan basis industri serta pengembangan sumberdaya manusia industrial.
- 4) Pengembangan agroindustri akan dilakukan dengan meningkatkan pemanfaatan hasil pertanian termasuk hasil samping limbahnya. Pengembangan agroindustri dilaksanakan dengan pendekatan agribisnis secara terpadu.
- 5) Pengembangan industri pengolahan hasil tambang dilakukan dengan memanfaatkan hasil tambang sehingga meningkatkan nilai tambah serta menunjang pengembangan industri dasar dan industri penghasil bahan baku. Usaha ini dilakukan dengan mengembangkan jenis industri pengolahan yang sudah ada dan pengembangan jenis industri yang baru.
- 6) Pengendalian pencemaran lingkungan untuk mewujudkan pembangunan industri berwawasan lingkungan diharapkan mampu mempercepat laju pembangunan industri tidak merusak kelestarian fungsi lingkungan hidup. Sejalan dengan itu, dilaksanakan kegiatan penyebaran informasi, pendidikan dan pelatihan, serta bimbingan mengenai pencegahan dan pengendalian lingkungan, pemantauan dan pengawasan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundangan serta ketentuan lain yang berlaku.
- 7) Pengembangan informasi industri guna mendukung berhasilnya pembangunan industri melalui upaya pengembangan jaringan informasi industri antar pemerintah dan dunia usaha, antar daerah dilanjutkan dan ditingkatkan. Pengembangan sistem informasi ini meliputi informasi teknologi, usaha industri, pemasaran hasil industri, peluang usaha dan investasi, serta informasi industri lainnya.
- 8) Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bertujuan untuk menyediakan tenaga-tenaga terampil di bidang industri sesuai dengan kebutuhan yang terus berkembang.
- 9) Penelitian dan pengembangan industri ditekankan pada penelitian dan pengembangan teknologi terapan, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun dunia usaha dan diarahkan untuk menghasilkan berbagai informasi dan temuan yang bermanfaat, terutama di bidang teknologi dan

manajemen dalam rangka menunjang pelaksanaan program pembangunan industri.

2. Perdagangan

a. Arah Kebijakan

Kebijakan pembangunan perdagangan, diarahkan untuk :

- 1) Mengembangkan pasar tradisional dan pemberian bantuan modal terutama kepada usaha kecil dan menengah serta koperasi merupakan bagian penting dari usaha penurunan kemiskinan.
- 2) Meningkatkan pertumbuhan nilai tambah sektor perdagangan dalam kontribusinya terhadap *Product Domestic Regional Bruto* (PDRB) DIY.
- 3) Mewujudkan pertumbuhan penyerapan kesempatan kerja di sektor perdagangan.
- 4) Meningkatkan peranserta perdagangan skala kecil terhadap pengembangan mitra usaha skala menengah dan besar secara berkeadilan.
- 5) Meningkatkan kemampuan manajerial dan kewirausahaan melalui kegiatan pelatihan dan penyuluhan.
- 6) Mewujudkan peningkatan ekspor non migas DIY.
- 7) Mewujudkan pengembangan pasar modern secara proporsional di lokasi yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

b. Program

- 1) Pengembangan kerjasama perdagangan dengan sasaran berupa peningkatan akses pasar dengan berpartisipasi dalam forum perdagangan internasional, serta sasaran berupa perintisan peningkatan dan pemantapan kerjasama antar lembaga/badan, baik oleh pemerintah maupun swasta dalam bidang perdagangan, baik bilateral maupun multilateral.
- 2) Pengembangan perdagangan luar negeri, yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing komoditi ekspor dan kemampuan penyesuaian terhadap perubahan pasar, meningkatkan struktur komoditi ekspor dan perluasan negara tujuan ekspor, mengembangkan eksportir menengah dan kecil, serta fasilitas kredit ekspor. Adapun sasarannya adalah mengurangi berbagai hambatan izin usaha perdagangan, menyempurnakan sistem informasi pasar dan pengembangan pola promosi/pameran, meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan, mengembangkan pasar desa, lokal, dan regional secara proporsional, pemantauan dan pengendalian inflasi harga barang.

3. Pariwisata

a. Arah Kebijakan

Pariwisata dapat berfungsi sebagai salah satu elemen pengembangan wilayah, bahkan memegang peranan penting dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Yogyakarta. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya sektor-sektor terkait yang ikut terkena dampak dari menurunnya jumlah wisatawan di Yogyakarta.

Untuk itu upaya untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan di Yogyakarta adalah merupakan hal yang penting dalam meningkatkan pendapatan dari sektor pariwisata. Dengan adanya program nasional Pariwisata Peduli Rakyat, tantangan untuk melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan di Yogyakarta adalah merupakan tantangan utama saat ini.

Berdasarkan hal tersebut di atas serta berdasarkan ketentuan yang sudah dituangkan dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPD) DIY, arah kebijakan yang diterapkan dalam pengembangan kepariwisataan di DIY dapat dijabarkan, sebagai berikut :

- 1) Mengembangkan aspek kebijaksanaan, meliputi kebijaksanaan yang merupakan derivasi dari misi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan masyarakat yang mengarah pada terwujudnya keseimbangan peran antara pemerintah, swasta dan masyarakat; kebijaksanaan yang merupakan derivasi dari misi posisi DIY sebagai daerah tujuan wisata; kebijaksanaan yang merupakan derivasi dari misi peningkatan kualitas SDM; kebijaksanaan yang merupakan derivasi dari misi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pariwisata.
- 2) Mengembangkan status dan destinasi. Strategi pengembangan jarak antara Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) satu dengan yang lain serta pusat kota Yogyakarta yang telah memiliki fasilitas lengkap dengan ODTW dengan meningkatkan pelayanan informasi kepariwisataan dan pemasaran produk pariwisata secara terpadu.
- 3) Mengembangkan produk wisata, yang meliputi 3 jenis yaitu pariwisata budaya sebagai pengembangan utama, pariwisata konvensi dan pariwisata minat khusus.

- 4) Melaksanakan inventarisasi dan pemberdayaan hotel melati, *home-stay* dan pondok wisata, serta dengan adanya pemerataan terhadap aspek kuantitas hotel berbintang. Tahap selanjutnya setelah pemanfaatan fasilitas akomodasi mendekati kapasitasnya, dilaksanakan pengembangan akomodasi sesuai dengan pertambahan kedatangan wisatawan.
- 5) Mengembangkan sarana prasarana pariwisata yang dilaksanakan secara kualitatif dengan memelihara dan meningkatkan serta melengkapi seluruh fasilitas sarana dan prasarana transportasi termasuk perlengkapan rambu-rambu jalan.
- 6) Mengembangkan sumberdaya manusia dengan meningkatkan keterkaitan dan kesepadanan pendidikan pariwisata dengan peluang kerja sektor pariwisata, meningkatkan standar kompetensi SDM pelayanan pariwisata, pembinaan dan pengembangan SDM diarahkan pada sikap mental pelaku pariwisata terutama dalam pelayanan sehingga mampu menjaga citra kepariwisataan DIY.

b. Program

Program pembangunan yang perlu dilakukan untuk mengembangkan pariwisata, antara lain meliputi :

- 1) Pembinaan dan pengembangan obyek dan sarana pariwisata, yaitu untuk membantu meningkatkan dan memelihara fasilitas fisik maupun non fisik yang ada pada ODTW baik yang sifatnya pelayanan maupun kenyamanan dan keamanan bagi para wisatawan yang berkunjung.
- 2) pemasaran dan promosi pariwisata, untuk memberikan informasi yang seluas-luasnya baik didalam maupun di luar negeri dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang sudah berkembang saat ini.
- 3) Peningkatan sumberdaya manusia sektor pariwisata, untuk meningkatkan kemampuan SDM para pelaku dan lembaga pariwisata guna meningkatkan kualitas pelayanan dan kenyamanan bagi wisatawan dengan memberikan informasi dan standar pelayanan bagi para pelaku pariwisata.
- 4) Perencanaan pengembangan pariwisata, untuk meningkatkan kualitas pariwisata dengan melakukan proses perencanaan pengembangan pariwisata secara terpadu dan terkait antar sektor.

Keterpaduan proses perencanaan dilakukan dengan melibatkan masyarakat pelaku pariwisata sebagai subyek utama pengembangan kepariwisataan yang peduli rakyat di Yogyakarta terutama yang berkaitan langsung dengan budaya, sejarah dan pendidikan.

4. Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan

a. Arah Kebijakan

Arah kebijakan dalam pembangunan pertanian secara luas adalah, sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan pertanian yang modern, tangguh dan efisien, produktif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi penduduk berupa gizi, protein dan kalori baik yang berasal dari tanaman pangan maupun dari sumber hewani yang berbasis sumberdaya lokal. Mengembangkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman produksi pangan dan ternak serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat petani melalui penyediaan prasarana dan sarana produksi dan pelatihan.
- 2) Melaksanakan intensifikasi pengelolaan hutan negara, meningkatkan produktivitas dan nilai kawasan hutan, meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan untuk kelestarian dan kelangsungan flora dan fauna unggulan serta peningkatan penguasaan dan penerapan teknologi yang mampu menciptakan peluang usaha.
- 3) Mengadakan koordinasi pelaksanaan di tingkat lapangan sampai dengan tingkat penentu kebijakan pembangunan perkebunan dilakukan secara terpadu. Kebijakan lainnya adalah meningkatkan produktivitas melalui peremajaan, rehabilitasi dan diversifikasi. Selanjutnya perlu pula dikembangkan pola kemitraan usaha sistem agribisnis dan agroindustri didasarkan pada kerjasama yang saling menguntungkan.
- 4) Memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan dan kemandirian petani kecil dan meningkatkan daya tahan terhadap timbulnya keadaan rawan pangan akibat ketergantungan pada komoditas pangan tertentu dan rentannya produksi terhadap perubahan alam.

b. Program

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka diperlukan program pembangunan pertanian, antara lain :

- 1) Peningkatan ketahanan pangan dengan tujuan untuk meningkatkan produksi pangan sebagai upaya penyediaan kebutuhan konsumsi bahan pangan dalam rangka menjamin ketersediaan gizi dan pangan, dan meningkatkan pendapatan dilakukan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas produksi, penganekaragaman usaha dan produksi pertanian, peternakan, serta mengembangkan kelembagaan pangan.
- 2) Pengembangan agribisnis berorientasi global dengan membangun keunggulan kompetitif produk-produk daerah berdasarkan kompetisi dan keunggulan komparatif sumberdaya alam dan SDM yang bermanfaat untuk mengembangkan usaha dan produksi serta untuk memperluas lapangan kerja *off-farm*. Program ini juga untuk membuka berkembangnya usaha sektor swasta dan perdagangan.
- 3) Optimalisasi fungsi dan pemanfaatan hutan dan kebun, ditujukan untuk memanfaatkan hutan dan kebun secara optimal, meningkatkan kualitas sumberdaya hutan dan kebun, mengurangi kerusakan hutan akibat gangguan hama, penyakit dan kerusakan tegakan melalui rehabilitasi tanaman dan lahan hutan dan perkebunan, perlindungan dan pengamanan hutan dan kebun serta konservasi alam, pemantapan pengelolaan hutan dan kebun serta pemberdayaan masyarakat sekitar hutan melalui hutan kerakyatan.
- 4) Pengembangan kelembagaan, sumberdaya manusia dan ilmu pengetahuan dan teknologi kehutanan dan perkebunan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan hutan dan meningkatkan peranan riset dalam pembangunan kehutanan dan perkebunan.

5. Perikanan dan Kelautan

a. Arah Kebijakan

Pembangunan bidang perikanan dan kelautan diarahkan, untuk :

- 1) Mengembangkan pemanfaatan potensi perikanan baik budidaya maupun penangkapan ikan sebagai upaya meningkatkan pendapatan petani/nelayan maupun untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

- 2) Mempertahankan kelestarian sumberdaya alam di wilayah pesisir dengan pengembangan konsep pengelolaan daerah pesisir terpadu (*integrated coastal zone management*).
- 3) Memanfaatkan sumberdaya laut secara berkelanjutan dalam jangka panjang, terpadu dan pemerataan pembangunan wilayah pesisir.
- 4) Megintegrasikan perencanaan sektoral pada kawasan pesisir untuk mengatasi tumpang tindih pengelolaan, konflik pemanfaatan dan kewenangan, serta memberi kepastian hukum bagi para pelaku pembangunan pada kawasan pesisir.
- 5) Menetapkan standar pelayanan minimum dan petunjuk dalam pengembangan rencana pengelolaan kawasan pesisir pada semua aras (*level*) pemerintahan.
- 6) Mendefinisikan peranan setiap aras pemerintahan dalam hal sertifikasi dan implementasi rencana pengelolaan pesisir.

b. Program

- 1) Pemanfaatan sumberdaya pantai dan kelautan dengan memberdayakan masyarakat pantai/nelayan yaitu dengan meningkatkan pemanfaatan lahan pantai untuk kegiatan budidaya tambak, meningkatkan ekspor hasil perikanan laut, menciptakan usaha pengelolaan pantai dan kelautan yang profesional serta berwawasan lingkungan.
- 2) Pengembangan budidaya perikanan darat secara terpadu (*integrated aquaculture*) dengan memanfaatkan lahan dan air secara optimal.
- 3) Pembentukan kemitraan partisipatif dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan.
- 4) Pengembangan prasarana dan sarana perikanan dan kelautan.

6. Sumberdaya Air dan Irigasi

a. Arah Kebijakan

Dalam upaya pembangunan sumberdaya air dan irigasi melalui pendayagunaan dan pengamanan sumberdaya air diterapkan konsep pembangunan pengairan yang mengacu kepada Satuan Wilayah Sungai (SWS) dengan prinsip “satu sungai, satu perencanaan dan satu kesatuan sistem pengelolaan” (*one river, one plan, one integrated management*).

Dengan pendekatan tersebut, maka disusun arah kebijakan pembangunan sumberdaya air dan irigasi, sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan pembangunan sumberdaya air yang tidak lagi bersifat sektoral tetapi bersifat terpadu dalam kerangka pengembangan wilayah yang mengacu pada kelestarian lingkungan, dengan disesuaikan dan diarahkan untuk mendukung Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
- 2) Mengarahkan pembangunan sumberdaya air menuju pada upaya pendayagunaan dan pengamanan sumberdaya air yang berkelanjutan dengan memperhatikan keseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan sumberdaya air.
- 3) Menerapkan paradigma baru mengenai fungsi air, yaitu air mempunyai nilai ekonomi disamping fungsi sosial. Pola konsumsi air juga perlu dirubah dari pola penggunaan air tanah bebas menjadi penggunaan air secara hemat.
- 4) Melibatkan secara menyeluruh semua sektor yang berkaitan dengan sumberdaya air untuk memberikan dukungan secara aktif dalam pengelolaannya.
- 5) Memfungsikan hasil pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pengairan (PSDP) pada waktu yang akan datang secara optimal dan dan berkelanjutan. Dalam pembangunan PSDP yang baru, upaya optimalisasi dan kelanjutan fungsi dari pembangunan pengairan akan menjadi salah satu kriteria perencanaan melalui manajemen aset.
- 6) Memantapkan sistem operasi dan pemeliharaan yang disertai dengan usaha meningkatkan partisipasi masyarakat untuk aktif dalam pemeliharaan prasarana pengairan, mengendalikan pengalihan lahan pertanian produktif menjadi pemanfaatan lainnya, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mampu meningkatkan nilai tambah air, mencegah penurunan mutu air akibat pencemaran air dan menjaga kelestarian sumber air.
- 7) Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan SDM dalam pengelolaan irigasi baik pada aparatur pemerintah maupun segenap lapisan masyarakat, meningkatkan pendayagunaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), mengembangkan badan usaha perdesaan yang bergerak dalam pengelolaan irigasi serta penataan dan penyusunan kembali peraturan-peraturan untuk pengelolaan irigasi sesuai dengan Pembaruan Kebijakan Pengelolaan Irigasi (PKPI).

- 8) Memberikan peluang kepada masyarakat untuk ikut menentukan keputusan dalam pembangunan sumberdaya air. Dalam bidang irigasi, Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) akan disertai kewenangan untuk mengelola jaringan irigasi pada tingkat primer dan sekunder (selain tingkat tersier yang secara hukum telah menjadi kewenangannya). P3A juga akan diarahkan untuk menjadi “unit ekonomi perdesaan yang mandiri dan bergerak di bidang pengelolaan air” dalam pilihan bentuk kelembagaan sesuai dengan kebutuhan P3A yang bersangkutan. Peran pemerintah akan bergeser dari “penyedia dan pembangun sarana” (*provider*) menjadi “pemberdaya” (*enabler*).

b. Program

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka program pembangunan yang dilakukan, adalah :

- 1) Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya air, yang bertujuan untuk membantu meningkatkan peran dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya air.
- 2) Pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi sumberdaya air yang ditujukan untuk melestarikan fungsi dan kemampuan sumberdaya air lintas kabupaten/kota, serta memulihkan kemampuan sumberdaya air yang rusak sehingga dapat berfungsi kembali sesuai dengan potensi yang dimilikinya.
- 3) Peningkatan efisiensi pemanfaatan sumberdaya air, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan sumberdaya air, mencakup upaya penghematan penggunaan sumberdaya air dan penerapan teknologi yang ramah lingkungan.
- 4) Pelaksanaan rehabilitasi pelayanan prasarana, bertujuan untuk dapat memanfaatkan prasarana yang dipakai khususnya prasarana pengairan lintas kabupaten/kota agar dapat beroperasi dengan tingkat maksimal.
- 5) Peningkatan peranserta swasta, koperasi dan masyarakat, dengan tujuan untuk menciptakan kompetisi penyelenggaraan prasarana; meningkatkan peran serta pengusaha golongan ekonomi lemah dan koperasi dalam pembangunan prasarana pengairan.
- 6) Peningkatan potensi dan peran masyarakat, dengan tujuan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat, mewujudkan integrasi, dan

memberikan peluang yang sebesar-besarnya kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pengelolaan irigasi.

- 7) Pengembangan kelembagaan sosial ekonomi, dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan kelembagaan yang dibentuk oleh masyarakat agar mampu menjadi wahana bagi masyarakat dalam mengembangkan kehidupan ekonomi.

7. Pengembangan Usaha Daerah dan Keuangan Daerah

a. Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang ditempuh untuk mengembangkan usaha daerah dan keuangan daerah, adalah :

- 1) Meningkatkan upaya penerimaan daerah dengan menggali sumber-sumber PAD yang cukup potensial dan melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan PAD.
- 2) Meningkatkan efektifitas pengeluaran keuangan dengan mempertajam prioritas belanja pembangunan dan belanja rutin pada kegiatan-kegiatan yang benar-benar mendesak serta menyangkut kepentingan masyarakat luas, melakukan pengetatan anggaran dengan membatasi belanja rutin maupun pembangunan untuk kegiatan yang benar-benar penting dan mendesak.
- 3) Mengembangkan kemampuan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar mampu menjadi sumber penerimaan keuangan daerah.

b. Program

Program pembangunan untuk pengembangan usaha daerah dan keuangan daerah, antara lain adalah :

- 1) Peningkatan penerimaan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas penerimaan daerah baik yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD serta penerimaan lain-lain, yang dilakukan dengan peningkatan pelayanan dan pengelolaan yang lebih baik, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, penyuluhan kepada wajib pajak, penyusunan peraturan yang memadai.
- 2) Peningkatan efektifitas pengeluaran daerah yang bertujuan untuk mempertajam prioritas pembangunan dalam jangka pendek dan menengah, yang hasilnya berupa tersedianya kerangka pengeluaran daerah selama 3 (tiga) tahun mendatang yang akan dikaji kembali pada setiap tahunnya.

Dalam kerangka tersebut pengeluaran daerah ditetapkan berdasarkan kebutuhan daerah dalam rangka menunjang tugas pemerintahan dan pembangunan yang pelaksanaannya akan didanai melalui anggaran rutin maupun pembangunan.

- 3) Penyehatan BUMD, dengan sasaran penyempurnaan organisasi BUMD, peningkatan kemampuan manajemen BUMD, pengembangan kerjasama antara BUMD dengan pelaku ekonomi lainnya, peningkatan efisiensi dan produktivitas BUMD, dan peningkatan kemampuan keuangan BUMD.
- 4) Penyusunan APBD secara optimal dengan mengurangi defisit anggaran serta meningkatkan disiplin anggaran, yang dilakukan melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah, peningkatan sistem administrasi keuangan daerah.

8. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

a. Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang perlu ditempuh, adalah :

- 1) Memberdayakan Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah (KPKM) agar dapat menempati posisi strategis dan berperan dalam mempercepat perubahan struktural pembangunan ekonomi.
- 2) Memperluas dan memperkuat lembaga-lembaga pendukung pengembangan usaha serta pengembangan kewirausahaan dan kewirakoperasian melalui lembaga pendidikan dan pelatihan, penjaminan, asuransi dan advokasi.
- 3) Meningkatkan kualitas KPKM agar mampu memanfaatkan potensi, keterampilan atau keahliannya untuk berkreasi, berinovasi dan menciptakan lapangan kerja.
- 4) Mendorong berkembangnya KPKM yang produktif, berkualitas, dan memiliki etos kerja yang tinggi.

b. Program

Program pembangunan untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, adalah :

- 1) Perluasan dan perkuatan lembaga pendukung usaha KPKM, yang bertujuan untuk memperluas dan memperkuat peran dan fungsi lembaga-lembaga pendukung yang penting, baik dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif maupun meningkatkan produktivitas KPKM, terutama

pelaku usaha yang masih tertinggal, penumbuhan lembaga penjamin kredit, kemitraan, asuransi, advokasi dan promosi usaha. Selain itu dilakukan upaya-upaya peningkatan kemampuan aparat daerah untuk menjalankan fungsi sebagai fasilitator sejalan dengan pelimpahan kewenangan daerah dalam melaksanakan kebijaksanaan dan program pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah.

- 2) Pengembangan kewirausahaan dan kewirakoperasian, yaitu untuk mengembangkan sikap dan semangat kewirausahaan serta meningkatkan kemampuan/keterampilan pengusaha kecil dan menengah, yang dijiwai semangat kebersamaan. Sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya KPKM yang berjiwa wirausaha dan kooperatif, profesional, serta beretika usaha. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain pelatihan kewirausahaan, budaya berusaha, perencanaan dan strategi pengembangan usaha, serta etika berusaha dan profesi.
- 3) Pelatihan pengurus atau pengelola koperasi, pelatihan anggota koperasi untuk berusaha sesuai dengan jatidiri kooperatif, serta pelatihan motivator koperasi untuk meningkatkan partisipasi aktif anggota yang merupakan kunci pengembangan koperasi, pasar, manajemen usaha, teknologi dan informasi.

9. Transportasi

a. Arah Kebijakan

Dalam bidang transportasi diperlukan penanganan secara terpadu oleh berbagai pihak baik pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha. Arah kebijakan yang ditempuh, antara lain :

- 1) Mengembangkan kebijakan pembangunan transportasi yang mendukung pengembangan sistem transportasi nasional yang andal, berkemampuan tinggi, terpadu dan efisien serta mengacu pada pola tata ruang, membantu mengembangkan transportasi regional dengan perhatian pada daerah perdesaan, perluasan jaringan jalan dan angkutan umum ke daerah-daerah terpencil guna mendukung pemerataan penyebaran penduduk, membantu mengembangkan transportasi perkotaan, mendukung pembangunan industri, pertanian, perdagangan, pendidikan, kebudayaan dan pariwisata, meningkatkan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi, meningkatkan peran serta masyarakat, serta mengembangkan sumberdaya manusia dan teknologi. Untuk ini, diperlukan pengembangan sistem manajemen transportasi yang komprehensif.

- 2) Kebijakan yang diterapkan ini juga dimaksudkan untuk menunjang keberadaan DIY sebagai salah satu pusat pendidikan dan kebudayaan, daerah tujuan wisata utama, pusat industri kecil dan kerajinan, serta adanya kemauan untuk menjadikan DIY sebagai salah satu pusat pelayanan transportasi regional.
- 3) Memberikan dukungan dalam program peningkatan jumlah wisatawan yang datang ke DIY, melalui penataan sistem pelayanan transportasi secara terpadu yang mampu memberikan kemudahan bagi wisatawan untuk mengunjungi obyek-obyek wisata.
- 4) Memberdayakan masyarakat melalui pemberdayaan dan peningkatan pelayanan kendaraan angkutan umum secara berkelanjutan melalui sistem subsidi pemerintah sebagai salah satu bentuk *public service obligation*, di mana pelayanan masyarakat (*public service*) yang diberikan mencakup sarana dan prasarana untuk mendorong disiplin berlalu lintas yang baik serta memberikan kemudahan akses bagi semua golongan masyarakat.

b. Program

Program pembangunan transportasi yang perlu dilaksanakan bersama antara pemerintah, masyarakat dan pelaku sektor swasta, antara lain :

- 1) Pembangunan prasarana jalan dan jembatan, yaitu untuk memperluas prasarana jaringan transportasi yang menjangkau di wilayah pedesaan, perbatasan antar propinsi/kabupaten dan mendukung pertumbuhan daerah, serta tersedianya prasarana transportasi yang handal.
- 2) Pembangunan transportasi darat, yang ditujukan untuk mengembangkan transportasi terpadu antara transportasi jalan raya dan kereta api dan terciptanya transportasi darat yang tertib, lancar, aman dan nyaman.
- 3) Pembangunan transportasi udara, yaitu untuk meningkatkan sarana dan prasarana bandar udara dari bertaraf nasional menjadi bertaraf internasional disertai dengan peningkatan kualitas pelayanan dan dengan tetap menerapkan standar keselamatan penerbangan internasional sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga akan dapat meningkatkan jumlah wisatawan domestik maupun wisatawan manca negara.

10. Pertambangan

a. Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan pertambangan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan di bidang pertambangan, meliputi :

- 1) Memberikan dukungan terhadap pembangunan pertambangan melalui penyediaan data dasar pengembangan informasi geologi dan sumberdaya mineral, yaitu dengan pelaksanaan kegiatan inventarisasi, pemetaan, eksplorasi dan eksploitasi bahan tambang.
- 2) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengusahaan pertambangan melalui pembinaan pertambangan rakyat yang dilakukan secara terpadu melalui penyuluhan, bimbingan serta pembinaan usaha pertambangan dalam wadah koperasi.
- 3) Meningkatkan keterampilan, pengetahuan tentang teknik penambangan yang berwawasan lingkungan dan keselamatan para penambang terutama pada usaha pertambangan rakyat, sehingga kelestarian kemampuan sumberdaya alam dan fungsi lingkungan hidup tetap terjaga.
- 4) Memasyarakatkan hasil-hasil studi potensi pertambangan melalui kegiatan-kegiatan promosi dan pembuatan profil potensi tambang serta menciptakan iklim usaha yang menunjang peningkatan investasi di bidang pertambangan baik dalam usaha pertambangan maupun pengolahan hasil tambang dalam rangka meningkatkan nilai tambah hasil pertambangan.

b. Program

Beberapa program pembangunan pertambangan yang mendukung untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut antara lain, meliputi :

- 1) Pengembangan geologi dan sumberdaya mineral, yang meliputi kegiatan inventarisasi bahan galian, juga diteruskan upaya penyusunan perencanaan tata guna air tanah, bertujuan untuk menyediakan data dasar geologi dan potensi sumberdaya mineral.

- 2) Pengembangan usaha pertambangan rakyat terpadu bertujuan untuk meningkatkan peranserta masyarakat dalam pembangunan pertambangan secara lebih luas dan produktif yang mempunyai nilai ekonomis dan mempunyai manfaat untuk memperluas kesempatan berusaha dan perluasan lapangan kerja serta peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah, dilakukan melalui penyediaan wadah pembinaan bagi peningkatan peranserta rakyat dalam pertambangan oleh pemerintah dan para pelaku ekonomi yang kuat.
- 3) Peningkatan produksi dan penganekaragaman usaha pertambangan sebagai upaya untuk mengantisipasi perkembangan peningkatan permintaan akan hasil-hasil tambang seperti bahan galian untuk mendukung pemenuhan kebutuhan bahan baku industri.
- 4) Penelitian dan pengembangan pertambangan ditekankan pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertambangan dan pengolahan hasil tambang dalam rangka meningkatkan efisiensi dan mutu hasil tambang, dilaksanakan dengan penelitian dan pengembangan teknologi terapan secara bertahap melalui survai, pemetaan, dan penerapan Sistem Informasi Geografis (*Geographic Information System, GIS*).
- 5) Pengembangan kerjasama antara pemerintah dengan perguruan tinggi dalam peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertambangan dan pengolahan hasil tambang.
- 6) Pembinaan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui penegakan hukum dan pengendalian penambangan, bertujuan untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan kepedulian sosial melalui perencanaan terpadu dengan memasukkan aspek pembangunan yang berwawasan lingkungan secara dini, penyempurnaan terhadap pelaksanaan dan pengawasan analisis mengenai dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan, rencana pemantauan lingkungan, penyempurnaan peraturan proses kegiatan pertambangan, reklamasi, dan pemanfaatan lahan pasca tambang secara produktif melalui penerapan konsep penambangan berkelanjutan dan pemanfaatan lahan berganda.

11. E n e r g i

a. Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang ditempuh dalam rangka pengembangan energi antara lain, adalah :

- 1) Memasyarakatkan hasil-hasil penelitian dan percobaan dalam rangka penghematan BBM dan pemanfaatan sumber-sumber energi lain seperti biogas, biomassa, mikrohidro dan sebagainya, serta mengembangkan tungku hemat energi sehingga dapat menunjang upaya pengendalian lahan kritis dan rusaknya lingkungan.
- 2) Meningkatkan pemenuhan kebutuhan energi di perdesaan terutama kebutuhan energi untuk rumah tangga, dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada seperti penggunaan biogas, biomassa dengan didukung peningkatan kemampuan dan peranserta masyarakat.
- 3) Memperluas jangkauan tenaga listrik di perdesaan perlu terus ditingkatkan sampai ke dusun-dusun sehingga manfaatnya semakin banyak dinikmati masyarakat. Di samping itu penyuluhan terhadap masyarakat terutama yang dilalui oleh jaringan listrik akan lebih ditingkatkan untuk mengurangi terjadinya tingkat gangguan dan kecelakaan. Untuk daerah perdesaan yang tidak dimungkinkan untuk dialiri listrik dari PLN perlu dicarikan sumber tenaga listrik alternatif.

b. Program

Program pembangunan yang perlu dilakukan untuk mendukung terwujudnya arah kebijakan tersebut, adalah :

- 1) Pengembangan listrik perdesaan, yang ditujukan untuk pemeratakan ketersediaan energi listrik dalam meningkatkan ketersediaan dan kesejahteraan masyarakat di pedesaan. Untuk mendukung pengembangan listrik di pedesaan akan dibangun jaringan distribusi tegangan menengah, jaringan distribusi tegangan rendah dan gardu listrik.
- 2) Pengembangan tenaga minyak dan gas, batu bara dan energi lainnya, ditujukan untuk meningkatkan penemuan, penyediaan, dan penganeekaragaman, serta penghematan sumber energi.

- 3) Peningkatan, pelestarian dan pemanfaatan sumber energi biomassa dilakukan dengan menerapkan teknologi tepatguna disertai penyuluhan, sedang penggunaan tungku hemat energi terus ditingkatkan dan disebarluaskan.
- 4) Peningkatan kegiatan penyuluhan dan penyebarluasan hasil-hasil percobaan penggunaan dan pemanfaatan sumber energi yang berasal dari biogas.
- 5) Pemanfaatan tenaga surya dan air. Untuk daerah perdesaan yang secara ekonomis tidak dapat terjangkau aliran listrik dari PLN, pemanfaatan tenaga surya dengan sistem energi fotovoltaik terus dikembangkan. Dalam upaya meningkatkan penyediaan tenaga listrik perlu dilanjutkan pencarian dan penemuan daerah-daerah yang mempunyai potensi untuk pembangkitan tenaga listrik mikrohidro.
- 6) Penelitian dan pengembangan energi, ditujukan untuk meningkatkan kemampuan penguasaan dan pemanfaatan teknologi agar pengelolaan energi menjadi lebih berdayaguna dan berhasilguna. Penelitian dan pengembangan ini dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian dan lembaga ilmiah.
- 7) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penyediaan energi, yang ditujukan untuk meningkatkan produktivitas dan profesionalisme serta peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pelaksanaan pembangunan energi termasuk ketenagalistrikan yang dilaksanakan dengan pengembangan sumberdaya manusia serta sistem perencanaan dan pengadaan tenaga kerja.

12. Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

a. Arah Kebijakan

Kebijaksanaan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup diarahkan, untuk :

- 1) Meningkatkan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi berikutnya.
- 2) Memanfaatkan sumberdaya alam secara optimal dan seimbang dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampungnya sehingga lingkungan hidup dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
- 3) Meningkatkan potensi sumberdaya alam dan fungsi lingkungan hidup dengan melakukan kegiatan konservasi, rehabilitasi dan peningkatan keanekaragaman sumber melalui teknologi yang akrab lingkungan.
- 4) Mengembangkan dan meningkatkan sistem hukum agar supremasi hukum dapat ditegakkan.
- 5) Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan sistem informasi sumberdaya alam.
- 6) Mengembangkan kelembagaan, peranserta masyarakat dan kemampuan SDM dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
- 7) Memotivasi dan memberikan peluang kepada masyarakat untuk berperanserta secara aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup.

b. Program

Program pembangunan sumberdaya alam dan lingkungan hidup sebagai penjabaran arah kebijakan tersebut, meliputi :

- 1) Pengembangan informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang ditujukan untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi dan potensi sumberdaya alam dan lingkungan hidup di lintas batas secara lengkap, tepat dan cepat. Informasi ini disamping diperlukan untuk memberikan gambaran seobyektif mungkin tentang analisa dan evaluasi dampak kegiatan pembangunan juga diperlukan untuk menentukan rencana tataguna sumberdaya alam dan menjamin ketersediaannya secara berkelanjutan.
- 2) Peningkatan efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup lintas batas kabupaten/kota, yaitu untuk meningkatkan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup di lintas batas secara efisien dengan menggunakan teknologi yang tepat dan ramah lingkungan.

- 3) Pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi sumberdaya alam serta lingkungan hidup yang ditujukan untuk melestarikan sumberdaya alam dan fungsi lingkungan hidup dan merehabilitasi sumberdaya alam lintas kabupaten/kota yang rusak di lintas batas sehingga dapat berfungsi kembali sesuai dengan potensi yang dimilikinya, yang mencakup upaya pemulihan fungsi lingkungan sebagai akibat dari pemanfaatan sumberdaya alam yang kurang bijaksana.
- 4) Peningkatan pengawasan dan pengendalian pencemaran, peningkatan pengawasan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup yang ditujukan untuk mengendalikan pencemaran dan pemulihan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota yang rusak di lintas batas akibat pemanfaatan sumberdaya alam yang berlebihan, sehingga kualitas lingkungan hidup dapat ditingkatkan.
- 5) Penataan hukum dan kelembagaan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang ditujukan untuk menata dan menegakkan hukum serta mengembangkan kelembagaan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
- 6) Peningkatan kemampuan SDM di bidang lingkungan hidup yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia lingkungan hidup guna meningkatkan kualitas penanganan pengelolaan dan pelayanan informasi lingkungan hidup.
- 7) Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang ditujukan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat dalam partisipasinya terhadap pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

C. PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

1. Pembinaan Kehidupan Beragama

b. Arah Kebijakan

Upaya untuk menanggulangi masalah pembinaan kehidupan beragama adalah dengan semangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan budi pekerti luhur sejak usia dini, meningkatkan kerukunan hidup umat beragama, memberikan pelayanan yang proporsional kepada semua umat beragama dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya, dan mengaktualisasikan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan nilai-nilai agama, moral dan budi pekerti luhur.

c. Program

- 1) Penyempurnaan pendidikan agama baik tingkat dasar, menengah, tingkat tinggi, pesantren dan lembaga pendidikan khusus agama formal maupun nonformal, yang terfokus dalam implementasi program, kinerja sekolah/madrasah, kualitas keluaran (*output*) dengan orientasi pada peningkatan kualitas SDM.
- 2) Peningkatan dan pemantapan kerukunan hidup inter dan antar umat beragama dengan melakukan dialog antar umat, memfasilitasi dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi partisipasi umat dalam pembangunan serta memberikan penyuluhan keagamaan.
- 3) Peningkatan pelayanan kehidupan beragama, termasuk peningkatan kualitas pelayanan ibadah haji, peningkatan sarana dan prasarana kehidupan beragama serta pelayanan hukum agama secara proporsional sesuai kepentingan masyarakat. Di samping itu juga dilaksanakan peningkatan pembinaan keluarga sakinah (harmonis) melalui pendidikan agama dalam keluarga.
- 4) Peningkatan peran dan fungsi lembaga keagamaan dengan menjalin kemitraan dan pembinaan partisipasi umat beragama.

2. Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial

a. Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan taraf kesehatan dan kesejahteraan sosial yang optimal antara lain, adalah :

- 1) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ber-Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- 2) Meningkatkan profesionalisme upaya pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial.
- 3) Mengembangkan dan menerapkan pembiayaan kesehatan dengan sistem Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM).
- 4) Meningkatkan kepedulian, kebersamaan dan kemitraan dalam menanggulangi masalah kesehatan dan kesejahteraan sosial, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab penanganan masalah kesehatan dan sosial kepada para *stakeholders* pembangunan.

b. Program

Program pembangunan yang mendukung untuk mewujudkan arah kebijakan di atas antara lain, adalah :

- 1) Peningkatan kegiatan pemberdayaan konsep perilaku hidup bersih dan sehat, yaitu untuk memberdayakan individu dan masyarakat dalam memelihara, meningkatkan dan melindungi kesehatannya sendiri serta lingkungannya sehingga terwujud masyarakat yang sehat, mandiri dan produktif.
- 2) Peningkatan lingkungan sehat yaitu untuk mewujudkan mutu lingkungan hidup yang bersih dan sehat.
- 3) Peningkatan pemerataan dan mutu upaya kesehatan yang berhasil guna dan berdaya guna serta terjangkau segenap lapisan masyarakat, antara lain melalui penyediaan sarana pelayanan dasar dan rujukan.
- 4) Peningkatan sumberdaya kesehatan yang meliputi peningkatan jumlah dan mutu tenaga kesehatan dan para medis, serta penyediaan obat baik medis modern maupun yang berasal dari tanaman obat tradisional.
- 5) Peningkatan pengawasan obat, makanan dan bahan berbahaya yang ditujukan untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan obat, narkotika, psikoterapika, zat adiktif (NAPZA) dan bahan berbahaya lainnya.

- 6) Peningkatan manajemen kesehatan yang menjamin tercapainya sistem kesehatan yang efisien, efektif, berkualitas dan berkesinambungan.
- 7) Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendukung berkembangnya penanganan masalah kesehatan serta dengan upaya pengembangan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat.
- 8) Pengembangan potensi kesejahteraan sosial guna mewujudkan ketahanan sosial masyarakat melalui peningkatan kesadaran, tanggung jawab dan peran aktif masyarakat dalam menangani masalah sosial dan memperbaiki kualitas hidup dan kesejahteraannya.
- 9) Peningkatan kualitas manajemen pelayanan sosial yang ditujukan untuk meningkatkan mutu dan profesionalisme pelayanan sosial melalui pengembangan alternatif intervensi di bidang kesejahteraan sosial, peningkatan kemampuan, kompetensi pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat serta penetapan standarisasi dan legislasi pelayanan sosial.

3. Pemuda dan Olahraga

a. Arah Kebijakan

Kebijakan pembangunan pemuda dan olahraga diarahkan, untuk :

- 1) Mengembangkan iklim yang kondusif bagi generasi muda dalam mengaktualisasikan segenap potensi, bakat, dan minat.
- 2) Mengembangkan minat dan semangat kewirausahaan di kalangan generasi muda yang berdaya saing, unggul, dan mandiri.
- 3) Melindungi generasi muda dari perilaku destruktif terutama bahaya penyalahgunaan obat-obat terlarang, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA).
- 4) Membudayakan olahraga guna meningkatkan kesehatan dan kebugaran, serta meningkatkan usaha pembibitan dan pembinaan olahraga prestasi termasuk organisasi olahraga penyandang cacat.

b. Program

Pembangunan bidang pemuda dan olahraga dilaksanakan dengan program, sebagai berikut :

- 1) Pengembangan kebijakan kepemudaan melalui penciptaan keserasian antar kebijakan dari tingkat nasional sampai daerah serta melalui pengembangan berbagai materi komunikasi, informasi, dan evaluasi untuk intensifikasi penelitian dan pengembangan kepemudaan.
- 2) Peningkatan partisipasi pemuda melalui kegiatan peningkatan keterampilan/keahlian tenaga kerja pemuda, kewirausahaan pemuda, peningkatan kepedulian pemuda terhadap penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dan informasi, pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya alam, apresiasi seni dan budaya, kesetiakawanan sosial, peningkatan peran aktif pemuda dalam penanggulangan masalah penyalahgunaan NAPZA, minuman keras dan kriminalitas, dan peningkatan jaringan kerjasama pemuda baik tingkat nasional maupun internasional.
- 3) Pengembangan dan keserasian kebijakan olahraga melalui kegiatan pengkajian dan perumusan kebijakan pembangunan olahraga serta melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan olahraga.
- 4) Pemasyarakatan olahraga dan kesegaran jasmani melalui kegiatan pengembangan olahraga anak, pendidikan jasmani di sekolah dan perguruan tinggi, olahraga di tempat kerja, olahraga rekreasi, olahraga lanjut usia, olahraga penyandang cacat, olahraga tradisional, pelayanan koordinasi-integrasi-evaluasi dan konseling bagi masyarakat olahraga dan pengembangan peranserta masyarakat, dunia usaha dalam pengembangan prasarana dan sarana olahraga.
- 5) Pemanduan bakat dan pembibitan olahraga melalui kegiatan identifikasi pengembangan olahraga unggulan daerah, identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga, pembinaan dan pembibitan olahragawan berbakat dan peningkatan partisipasi masyarakat dan sektor swasta untuk mendukung pendanaan olahraga
- 6) Pembinaan prestasi olahraga melalui kegiatan identifikasi dan pembinaan prioritas cabang olahraga prestasi di tingkat daerah dan nasional, penyelenggaraan kompetisi olahraga dan peningkatan partisipasi masyarakat dan sektor swasta untuk mendukung pembinaan olahraga prestasi.

4. Kependudukan

a. Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan kependudukan ditempuh dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dan LSM serta dunia usaha untuk meningkatkan mutu dan cakupan penyelenggaraan pembangunan kependudukan yang ditujukan, untuk :

- 1) Memberikan fasilitas bagi masyarakat untuk memudahkan pelaksanaan peran dan partisipasi dalam penyelenggaraan upaya pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana, serta pelayanan sosial dan peningkatan kualitas ketenagakerjaan.
- 2) Meningkatkan kualitas keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat, untuk meningkatkan ketahanan dan kesejahteraannya.

b. Program

Program yang diarahkan untuk kependudukan, adalah :

- 1) Pengembangan dan penserasian kebijaksanaan kependudukan sehingga terumuskan kebijaksanaan kependudukan bagi peningkatan kualitas, pengendalian kuantitas dan pengarahan penduduk secara serasi antara kebijaksanaan kependudukan nasional dengan kebijaksanaan kependudukan regional dan daerah.
- 2) Pengkajian terhadap kebijaksanaan pembangunan kependudukan yang telah ada dalam rangka mencari alternatif kebijaksanaan baru yang lebih efektif.
- 3) Pengkajian dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan yaitu kualitas, kuantitas dan mobilitas penduduk termasuk penduduk yang terpaksa pindah di semua tingkat wilayah administrasi.
- 4) Pemantauan dan pengkajian terhadap pelaksanaan kebijaksanaan kependudukan.
- 5) Pemberdayaan keluarga dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga yang ditandai dengan kesadaran dan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, sosial dan psikologisnya, sehingga jumlah keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I menurun, jumlah keluarga yang dapat mengakses informasi dan sumberdaya ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan keluarganya meningkat, kemampuan keluarga

dalam pengasuhan dan penumbuhkembangan anak meningkat, disharmoni dan tindak kekerasan dalam keluarga menurun, demikian pula dengan angka perceraian menurun.

- 6) Pengembangan sistem registrasi dan administrasi kependudukan dalam rangka mewujudkan data dan informasi kependudukan pada tingkat mikro, baik individu maupun keluarga dan tingkat makro yang akurat tersedia setiap saat, perlu dibangun sistem registrasi penduduk sehingga administrasi kependudukan yang tertib dapat terlaksana.
- 7) Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai kebersamaan dan kemitraan dalam kerangka menanggulangi masalah-masalah sosial.

5. Keluarga Berencana

a. Arah Kebijakan

Untuk mengatasi masalah kependudukan dan keluarga berencana, diberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat sendiri dengan dukungan dari pelaku sektor swasta dan difasilitasi oleh pemerintah untuk menyelenggarakan pembangunan kependudukan, yang antara lain meliputi :

- 1) Meningkatkan produktivitas penduduk melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan keterampilan kerja dan penciptaan lapangan kerja.
- 2) Meningkatkan kualitas Program Keluarga Berencana (KB) untuk memenuhi hak-hak reproduksi, kesehatan reproduksi, pemberdayaan keluarga, pengentasan keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I, peningkatan kesejahteraan anak dan pengendalian kelahiran agar terwujud Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (KKBS) menuju terwujudnya Keluarga Berkualitas.

b. Progam

Sesuai dengan arah kebijakan tersebut, maka program-program kependudukan dan KB diarahkan, kepada :

- 1) Pelaksanaan program pemberdayaan keluarga melalui kegiatan advokasi, Komunikasi Informasi Edukasi (KIE), konseling, peningkatan kemampuan SDM dan pelayanan pemberdayaan keluarga, bertujuan meningkatkan kesejahteraan ketahanan keluarga agar jumlah keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I alasan ekonomi menurun, serta meningkatnya kemampuan pengasuhan anak dan tumbuh kembangnya.
- 2) Pelaksanaan program kesehatan reproduksi remaja melalui kegiatan promosi kesehatan remaja, advokasi, KIE, konseling kesehatan remaja dan promosi pendewasaan usia kawin, bertujuan meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku positif remaja tentang kesehatan reproduksinya guna mendukung peningkatan kualitas generasi mendatang.
- 3) Pelaksanaan program keluarga berencana bertujuan memenuhi permintaan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang berkualitas serta mengendalikan angka kelahiran sehingga Pasangan Usia Subur (PUS) yang tidak terlayani KB menurun, angka fertilitas total (Total Fertility Ratio/TFR) menurun dan meningkatnya partisipasi pria dalam program KB. Tujuan tersebut akan dicapai melalui advokasi dan KIE-KB, peningkatan kualitas pelayanan kontrasepsi, jaminan dan perlindungan pemakai kontrasepsi, peningkatan kesejahteraan ibu dan anak, promosi serta pemenuhan hak-hak dan kesehatan reproduksi.
- 4) Pelaksanaan program penguatan kelembagaan dan jaringan KB bertujuan meningkatkan kemandirian, cakupan serta mutu pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang diselenggarakan oleh masyarakat agar tercapai peningkatan jumlah PUS ber KB mandiri, kesehatan reproduksi oleh masyarakat, jumlah lembaga penyelenggara pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. Tujuan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi ini dicapai melalui pelatihan dan bimbingan pelayanan dan manajemen bagi lembaga masyarakat, penyediaan dan pertukaran informasi, dukungan terhadap kegiatan pelatihan dan kerjasama internasional dan promosi kemandirian ber KB.

6. Tenaga Kerja dan Transmigrasi

a. Arah Kebijakan

Arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan pembangunan tenaga kerja dan transmigrasi, antara lain :

- 1) Meningkatkan kompetensi, kemandirian tenaga kerja, kesejahteraan, tingkat pengupahan dan perlindungan tenaga kerja serta kebebasan mengeluarkan pendapat dalam asosiasi pekerja.
- 2) Menciptakan lapangan kerja yang selaras dengan kebijaksanaan ekonomi makro yang ditujukan selain untuk mengurangi pengangguran juga untuk menciptakan adanya keselarasan penyerapan tenaga kerja berbagai sektor yang produktif di daerah.
- 3) Mengelola secara terpadu pengiriman tenaga kerja ke luar negeri sebagai upaya penyaluran tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran dengan memperhatikan kompetensi perlindungan dan pembelaan tenaga kerja serta menjaga tidak terjadinya eksploitasi tenaga kerja, yang didukung dengan penataan prosedur melalui penyempurnaan dan penyederhanaan sistem dan mekanisme pengiriman agar lebih efisien.
- 4) Mengembangkan kemitraan dan mendorong investor baik domestik maupun asing untuk menanamkan modalnya guna membangun perekonomian yang akan mempengaruhi pengembangan kesempatan kerja riil.
- 5) Mendayagunakan angkatan kerja yang produktif bagi angkatan kerja tertentu antara lain tenaga kerja terdidik, terlatih, setengah penganggur baik di perkotaan maupun di perdesaan dan pekerja sektor informal, melalui penyaluran tenaga kerja baik secara lokal maupun antar daerah dan antar negara.
- 6) Memberdayakan tenaga kerja melalui berbagai latihan keterampilan dalam rangka mempersiapkan tenaga kerja agar siap memasuki pasar kerja dan meningkatkan produktivitas kerja.
- 7) Melindungi tenaga kerja dan pemberian jaminan sosial tenaga kerja yang mendukung terwujudnya hubungan kerja yang harmonis dalam rangka pengembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan pekerja.

- 8) Menciptakan jaringan kerjasama antar pemerintah daerah, yaitu antara Pemerintah Daerah Tujuan Transmigrasi dengan Pemerintah Daerah Pengirim Transmigrasi serta pengembangan kemitrausahaan dengan segala pihak.

b. Program

Program pembangunan yang diarahkan untuk mendukung arah kebijakan antara lain, meliputi :

- 1) Penciptaan dan pengembangan kesempatan kerja perlu diterapkan model-model penciptaan lapangan kerja yang sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan kerja guna mengisi lowongan pasar kerja maupun dalam penciptaan lapangan kerja mandiri.
- 2) Penyaluran tenaga kerja melalui kegiatan antar kerja lokal, antar kerja antar daerah termasuk juga transmigrasi, dan antar kerja antar negara. Berkaitan dengan ini maka peranan swasta, pengerah jasa tenaga kerja Indonesia sangat diharapkan disamping peranan kerjasama antar pemerintah daerah. Program ini selain bertujuan untuk memperluas kesempatan kerja juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja sekaligus memperluas kesempatan kerja pada usaha kecil, menengah, koperasi dan lembaga mandiri yang diterima masyarakat, perlu didorong dan dimasyarakatkan. Sedangkan dalam rangka memenuhi kebutuhan dunia kerja yang semakin cepat dan beragam, diperlukan pelatihan yang luwes/fleksibel dengan kualifikasi kemampuan dan standar program pelatihan dibatasi pada hal atau pokok yang berlaku umum secara sektoral dan daerah. Bentuk-bentuk kemitraan antara pemerintah dan swasta dalam penyelenggaraan pelatihan, pemagangan untuk menjamin efektifitas dan efisiensi.
- 4) Perlindungan tenaga kerja, termasuk di dalamnya Angkatan Kerja Antar Daerah (AKAD), pekerja sektor informal dan pembantu rumah tangga, serta pengembangan lembaga ketenagakerjaan untuk menghasilkan syarat-syarat kerja yang berkualitas yang didasarkan atas musyawarah mufakat dan demokratis di perusahaan, maka didorong untuk terbentuknya kelembagaan tenaga kerja.

- 5) Pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, hendaknya didukung oleh sumberdaya yang memadai. Agar pekerja dapat hidup layak dan mendukung sektor riil, maka diperlukan jaminan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan.
- 6) Perlindungan bagi anak yang terpaksa bekerja, dan sesuai dengan Konvensi *International Labour Organization* (ILO) yang telah diratifikasi, juga diperjuangkan kesempatan untuk tetap mengikuti pendidikan untuk dapat mengembangkan mental, spiritual dan kemampuan intelektualnya.
- 7) Program transmigrasi dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan permintaan masyarakat dan pemerintah setempat serta diarahkan kepada penciptaan insentif melalui pemberdayaan kawasan dalam rangka menciptakan dinamika ekonomi baru guna mengurangi problem ketertinggalan, kemiskinan dan pengangguran serta penanganan pengungsi.

7. Peningkatan Peran Perempuan

a. Arah Kebijakan

Arah kebijakan dalam meningkatkan peran perempuan diutamakan, kepada :

- 1) Mengarusutamakan *gender* yang diikuti dengan penyempurnaan ataupun perubahan dari peraturan-peraturan perundangan di daerah yang tidak bias *gender* dan yang mengandung diskriminasi terhadap perempuan.
- 2) Meningkatkan kedudukan dan peran perempuan di berbagai bidang kehidupan.
- 3) Menyediakan advokasi, fasilitasi dan mediasi pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan generasi penerus, termasuk pemantapan, peningkatan peran dan kemandirian organisasi perempuan dengan tetap mempertahankan kesatuan dan persatuan, sehingga dapat meningkatkan peranan perempuan sebagai pengambil keputusan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan *gender*.
- 4) Meningkatkan kesadaran dan kepekaan *gender* melalui pengembangan jejaring (*network*) berbagai elemen masyarakat yang sadar dan peka *gender*.

b. Program

Berdasarkan arah kebijakan dalam meningkatkan peran perempuan, maka program peningkatan peran perempuan, terdiri dari :

- 1) Peningkatan kualitas hidup perempuan dan generasi penerus melalui pendidikan formal maupun nonformal dan penyusunan kurikulum yang adil *gender*, peningkatan kesehatan perempuan dengan pemberian pelayanan kesehatan yang lebih baik.
- 2) Peningkatan partisipasi perempuan di bidang ekonomi untuk mendukung otonomi daerah dan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan balai pemberdayaan perempuan di daerah untuk mempersiapkan tenaga kerja wanita yang berkualitas dan peningkatan kualitas dan keterampilan (*skill*) serta manajemen usaha dalam menghadapi globalisasi dan otonomi daerah.
- 3) Peningkatan sensitivitas dan kesadaran *gender* melalui pengarusutamaan *gender* (*gender mainstreaming*) bagi seluruh pelaku pembangunan didukung dengan sistem penganggaran pembangunan (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang adil *gender*.
- 4) Peningkatan kualitas organisasi wanita, organisasi pemerhati isu *gender*, dan institusi yang melakukan pengkajian *gender*.
- 5) Penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM) perempuan dalam kaitannya dengan kekerasan terhadap perempuan dan peraturan yang bias *gender*.
- 6) Peningkatan peran perempuan di bidang politik yaitu dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan, etika berpolitik praktis yang mendorong perempuan aktif di organisasi sosial politik, dan kepemimpinan.
- 7) Peningkatan peran perempuan dalam ketahanan dan keamanan melalui pencegahan dan pemberantasan NAPZA, kriminalitas serta pencegahan kerusuhan dan konflik sosial.

D. PENINGKATAN KETAHANAN BUDAYA

1. Arah Kebijakan

Upaya-upaya yang dilaksanakan dalam mencapai pusat budaya terkemuka, diarahkan pada upaya pencapaian sasaran, yang meliputi :

- a. Melaksanakan penanganan kawasan cagar budaya dan desa budaya dengan mengutamakan peranserta masyarakat, peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana bagi kegiatan para seniman.
- b. Mengkaji, menggali, melakukan penulisan dan menyebarluaskan kebudayaan dan sejarah.
- b. Meningkatkan kemampuan aparat dan masyarakat sebagai SDM yang akan melestarikan warisan budaya daerah/nasional.
- c. Meningkatkan inovasi dan kreatifitas dalam mengelola museum, serta penempatan bahasa dan sastra jawa sebagai aset daerah yang tinggi nilainya.
- d. Melestarikan budaya adiluhung yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.

2. Program

Program-program yang dilaksanakan untuk mendukung pembangunan kebudayaan, adalah :

- a. Pengembangan dan pembinaan kebudayaan daerah.
- b. Perumusan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal.
- c. Pengembangan sikap kritis masyarakat terhadap nilai-nilai budaya.
- d. Pengembangan kebebasan berkreasi dan berkesenian.
- e. Melestarikan apresiasi nilai kesenian dan kebudayaan.
- f. Mengembangkan kesenian dan kebudayaan serta wisata budaya.

E. PEWUJUDAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SEBAGAI PUSAT PENDIDIKAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI TERMUKA

1. Pendidikan

a. Arah Kebijakan

Kebijakan di bidang pendidikan diarahkan, untuk :

- 1) Memperluas kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi semua anggota masyarakat.
- 2) Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional dengan meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan, memperbaharui sistem pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum, memberdayakan lembaga pendidikan, memantapkan sekolah dan lembaga pendidikan luar sekolah berdasarkan prinsip desentralisasi dan otonomi keilmuan dan manajemen.
- 3) Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat maupun pemerintah melalui pembinaan dan penegakan peraturan perundang-undangan, mengembangkan kualitas SDM sedini mungkin secara terarah, terpadu, dan menyeluruh agar tercipta generasi muda yang cerdas, santun sekaligus berbudi pekerti luhur.

b. Program

- 1) Perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi.
- 2) Peningkatan kemampuan akademik dan profesional serta peningkatan jaminan kesejahteraan tenaga pendidikan.
- 3) Pembaruan sistem pendidikan antara lain melalui penyempurnaan kurikulum dan metode pembelajaran.
- 4) Pengembangan pesantren sebagai lembaga pendidikan berbasis masyarakat dan lembaga pendidikan keagamaan.
- 5) Pembaruan dan pemantapan sekolah dan lembaga pendidikan luar sekolah, berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan dan manajemen.
- 6) Peningkatan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah.

- 7) Pengembangan kualitas sumberdaya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu dan menyeluruh agar generasi muda dapat berkembang secara optimal.
- 8) Pengembangan pendidikan dasar dengan penekanan pada budi pekerti luhur.

2. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

a. Arah Kebijakan

Upaya-upaya untuk mencapai peningkatan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah, dengan :

- 1) Memfasilitasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.
- 2) Menciptakan kondisi kompetitif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 3) Menjembatani hubungan antar lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga pendidikan, perguruan tinggi dan lembaga pengembangan dunia usaha.
- 4) Melindungi karya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pemasyarakatan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) serta upaya penegakan hukumnya.

b. Program

Program-program dalam rangka mendukung pembangunan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, adalah :

- 1) Peningkatan kualitas SDM dengan memberdayakan lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan yang ada.
- 2) Pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat agar mempunyai kepedulian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 3) Pengembangan dan pengkajian hasil-hasil penelitian.
- 4) Peningkatan alih teknologi dan menerapkan teknologi tepatguna bagi dunia usaha.
- 5) Pelaksanaan sosialisasi HaKI pada masyarakat untuk mendorong kompetisi yang positif dan sehat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah serta dengan upaya penegakan hukumnya.

F. PENINGKATAN PERAN MASYARAKAT

1. Arah Kebijakan

Arah kebijakan peningkatan peran masyarakat ditempuh secara simultan dengan pemberdayaan masyarakat, melalui strategi penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, penguatan potensi atau sumberdaya yang dimiliki masyarakat, serta dengan membuka peluang untuk akses informasi bagi masyarakat dan dengan melaksanakan perlindungan khususnya agar masyarakat yang lemah tidak semakin lemah.

2. Program

Berdasar arah kebijakan tersebut maka program peningkatan peran masyarakat, adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat melalui pemangkasan birokrasi dan penyederhanaan prosedur, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kelembagaan yang dibentuk oleh masyarakat setempat agar mampu menjadi wahana bagi masyarakat dalam mengembangkan kehidupan ekonomi.
- b. Pengembangan bantuan sosial keluarga miskin, bertujuan untuk menyediakan bantuan sosial kepada kelompok masyarakat atau keluarga miskin.
- c. Pengembangan sistem jaminan sosial, bertujuan memberikan dukungan dan mendorong terselenggaranya sistem jaminan sosial bagi masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.
- d. Peningkatan kelembagaan keswadayaan, bertujuan meningkatkan kelembagaan keswadayaan yang berfungsi dalam penggalangan solidaritas sosial dan partisipasi masyarakat.
- e. Peningkatan kemandirian masyarakat, bertujuan meningkatkan pemahaman tentang politik bagi masyarakat dan informasi perkembangan perpolitikan untuk meningkatkan rasionalitas dan kemandirian politik.
- f. Penyederhanaan jalur birokrasi bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan pemerintah dan pemberian informasi pelayanan dan kemudahan untuk memperoleh akses informasi.

BAB VI

PEMBANGUNAN KAWASAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

Pengalaman menunjukkan bahwa selama ini pembangunan dengan pendekatan sektoral menghasilkan produk pembangunan yang seringkali berdiri sendiri tanpa ada keterkaitan satu dengan lainnya, yang mengakibatkan tidak efisiennya pembangunan atau bahkan tidak ada kegunaannya. Pendekatan sektoral juga mengakibatkan munculnya egoisme sektoral dimana masing-masing sektor merasa paling penting atau diperlukan dalam pembangunan pada suatu daerah atau wilayah.

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) secara administratif terdiri dari empat kabupaten dan satu kota, namun jika ditinjau dari segi fisiografis DIY terdiri dari kawasan-kawasan yang terbagi menurut satuan geografis, tingkat perkembangan maupun tingkat produktivitasnya. Belajar dari pengalaman masa lalu sebagaimana disebutkan di atas, maka untuk selanjutnya pendekatan sektoral akan digantikan dengan pendekatan pembangunan kawasan dan pengembangan wilayah.

Pengertian pendekatan pembangunan kawasan dan pengembangan wilayah pada dasarnya adalah penekanan (prioritasi) program pembangunan pada suatu satuan wilayah pengembangan yang diarahkan atau bertumpu pada sektor tertentu yang paling potensial untuk dikembangkan. Pemberian prioritas pada sektor tertentu disusun berdasarkan kebutuhan akan pembangunan dari kawasan atau wilayah tersebut. Dengan pemikiran ini maka pada suatu kawasan atau wilayah akan ada sektor utama (*leading sector*) dan sektor pendukung. Sektor utama ditentukan berdasarkan kajian terhadap sektor pembangunan yang paling menguntungkan untuk dikembangkan dari beberapa sektor unggulan di kawasan atau wilayah tersebut, sedang sektor unggulan lainnya akan menjadi sektor pendukung dalam program pembangunan kawasan dan pengembangan wilayah tersebut.

Pendekatan ini bukan berarti bahwa pada kawasan atau wilayah pengembangan tertentu dengan prioritas pada sektor unggulan tertentu lalu tidak akan memberi kesempatan pada sektor atau bidang lain, karena ada sektor-sektor atau bidang-bidang pembangunan lainnya yang harus tetap ada dan mengacu pada arah kebijakan dan program sebagaimana tercantum dalam dokumen pembangunan. Program-program pembangunan lainnya tetap mengacu kepada arah kebijakan dan program-program sektoral sebagaimana tercantum dalam Bab V.

Berdasarkan ciri-ciri fisiografis, DIY dapat dibagi ke dalam empat wilayah pengembangan, yaitu :

1. Wilayah Pengembangan Barat, meliputi wilayah Kabupaten Kulon Progo, tidak termasuk wilayah pesisirnya.
2. Wilayah Pengembangan Tengah, meliputi Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul, tidak termasuk wilayah pesisir Bantul.
3. Wilayah Pengembangan Timur, meliputi sebagian Kabupaten Bantul sebelah timur dan Kabupaten Gunung Kidul
4. Wilayah Pesisir, membujur dari Pantai Congot di Kabupaten Kulon Progo sampai dengan Pantai Sadeng di Kabupaten Gunung Kidul.

Selain dari wilayah pengembangan tersebut, ada beberapa kawasan yang karena kondisinya harus ditangani secara tertentu. Kawasan-kawasan ini meliputi kawasan tertinggal, kawasan andalan dan kawasan strategis.

A. PERTANAHAN

1. Arah Kebijakan

Arah kebijakan dalam bidang pertanahan, yang ditempuh adalah :

- a. Membantu mengelola masalah pertanahan yang diarahkan kepada terwujudnya keadilan dan rasa adil sebagai bagian dari usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Menerapkan kebijakan pertanahan yang mampu mengakomodasi tuntutan masyarakat dengan tetap memperhatikan kepentingan pembangunan yang meliputi aspek-aspek demokratisasi, hak asasi manusia, perlindungan terhadap kepentingan golongan ekonomi lemah, serta kepastian hukum dan transparansi dalam pemberian hak atas tanah dan pemanfaatannya.
- c. Mengembangkan kebijaksanaan dan iklim (insentif dan dis-insentif) yang dapat memperbesar ketersediaan tanah untuk kebutuhan masyarakat kecil dan kepentingan umum.
- d. Mengembangkan kapasitas administrasi pertanahan yang efektif meliputi prosedur penguasaan, hak kepemilikan, dan pengalihan hak atas tanah.

- e. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi pertanahan untuk meningkatkan administrasi pertanahan, mempermudah proses transaksi penjualan tanah dan pemanfaatan tanah untuk kegiatan investasi, dan peningkatan administrasi perpajakan tanah untuk meningkatkan pendapatan daerah.
- f. Meningkatkan keterlibatan unsur-unsur kelompok independen dalam pengelolaan pembebasan tanah untuk kepentingan umum dan pembangunan skala besar agar berbagai kepentingan yang berbeda dapat dipertemukan secara memuaskan bagi semua pihak.

2. Program

Program prioritas yang perlu dilakukan, adalah :

- a. Peningkatan pelayanan pertanahan melalui penyempurnaan prosedur dan transparansi pelayanan pertanahan.
- b. Penerapan pola adjudikasi dalam pelayanan masal, yang dengan pola ini petugas akan berperan aktif mendatangi pemilik tanah.
- c. Pelaksanaan sosialisasi sistem pelayanan pertanahan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajibannya dalam bidang pertanahan.
- d. Pengembangan sistem informasi pertanahan agar dapat mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi menyiapkan informasi pertanahan untuk keperluan penetapan kebijakan bidang pertanahan, menyiapkan informasi pertanahan untuk keperluan perencanaan dan penyusunan rencana tata ruang wilayah dan penataan pertanahan, serta menyiapkan informasi pertanahan untuk keperluan pelayanan pertanahan.
- e. Pengembangan kapasitas kelembagaan pengelolaan pertanahan, bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan organisasi pengelolaan pertanahan di daerah. Sasarannya adalah meningkatnya kinerja pemerintah di berbagai tingkatan khususnya pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pengelolaan pertanahan sesuai dengan kompleksitas permasalahan yang ada.

B. PENATAAN RUANG

1. Arah Kebijakan

Arah kebijakan dalam penataan ruang wilayah dan daerah, sebagai berikut :

- a. Memantapkan sistem perencanaan tata ruang dengan meningkatkan ketersediaan rencana tata ruang wilayah, kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, dan kawasan khusus yang dilakukan secara transparan, partisipatif, dan sesuai dengan kaidah perencanaan.
- b. Meningkatkan ketertiban pemanfaatan ruang melalui penyediaan rencana rinci tata ruang dan melengkapinya dengan kebijaksanaan, peraturan-peraturan standar, mekanisme perijinan dalam pemanfaatan ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang, dengan menjaga konsisten peraturan daerah dan penegakan hukum.
- c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan penataan ruang melalui pengembangan prosedur dan mekanisme, pengembangan organisasi, pemasyarakatan prinsip penataan ruang, termasuk mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam penyusunan rencana, perwujudan pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- d. Mengembangkan sistem informasi penataan ruang guna transparansi penataan ruang dan merupakan usulan dalam penanganan program-program pemanfaatan ruangan pembangunan serta kepastian hukum.

2. Program

Untuk mewujudkan tata ruang di DIY disusun program dan kegiatan, sebagai berikut :

- a. Pemantapan sistem perencanaan tata ruang, bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan sistem rencana tata ruang di berbagai tingkatan sebagai acuan dalam perencanaan kegiatan dan perwujudan pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat.

Sasaran program ini adalah meningkatnya ketersediaan rencana tata ruang yang legitimatif terutama di tingkat propinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan secara transparan dan partisipatif, dengan prioritas pada daerah yang memiliki persoalan perkembangan yang pesat, konflik kepentingan, dan menghadapi masalah lingkungan.

- b. Peningkatan ketertiban pemanfaatan ruang, ditujukan untuk memantapkan proses perwujudan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang pada skala wilayah dan kawasan. Sasaran yang dicapai dalam program ini adalah tersedianya kebijaksanaan, peraturan, mekanisme perijinan yang dapat memberikan alat pengambilan keputusan dalam rangka perwujudan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang secara efektif.
- c. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Penataan Ruang, bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan organisasi penataan ruang di daerah. Sasarannya adalah meningkatnya kinerja pemerintah di berbagai tingkatan khususnya pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kegiatan penataan ruang sesuai dengan dinamika dan kompleksitas permasalahan yang ada.
- d. Pengembangan sistem informasi tata ruang.

C. PEMBANGUNAN DAERAH

1. Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan daerah yang berdasarkan karakteristik potensi, geografis dan kebutuhan daerah, adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan aksesibilitas untuk memperlancar aliran investasi dan produksi dan menciptakan keterkaitan ekonomi antarwilayah yang saling mendukung.
- b. Mendorong pemanfaatan potensi suberdaya alam yang belum tergali di wilayah yang relatif tertinggal dan menciptakan perkembangan kawasan-kawasan potensi ekonomi baru.

- c. Meningkatkan kelangsungan kegiatan usaha yang sudah ada pada sentra-sentra produksi di daerah yang relatif maju sebagai andalan pertumbuhan ekonomi dan mengembangkannya dalam kerangka perekonomian wilayah berdasarkan kesamaan karakteristik potensi, geografis, dan kebutuhan daerah.
- d. Meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengembangkan daya tarik investasi berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif masing-masing daerah sesuai dengan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan lokasi geografisnya.

2. Program

Program prioritas pembangunan daerah yang mengarah untuk mewujudkan kebijakan tersebut, adalah :

- a. Pengembangan jaringan prasarana dan sarana antar wilayah, bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas, memperlancar aliran investasi dan produksi dan menciptakan keterkaitan ekonomi antarwilayah, termasuk keterkaitan antara daerah maju, berkembang, dan terbelakang.
- b. Pengembangan kawasan tertinggal ditujukan untuk mendorong pengembangan kawasan-kawasan tertinggal dan relatif belum tersentuh oleh program pembangunan dengan menggali potensi sumberdaya alam dan menciptakan kawasan-kawasan potensi ekonomi baru serta peningkatan sarana perhubungan.
- c. Pengembangan kawasan sentra produksi, sentra industri dan kawasan andalan, ditujukan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi kawasan yang berpotensi cepat tumbuh sebagai andalan pengembangan ekonomi daerah dan penggerak kegiatan ekonomi sekitarnya.

D. PEMBANGUNAN PERKOTAAN

1. Arah Kebijakan

Untuk menghadapi permasalahan dalam Pembangunan Perkotaan, maka strategi kebijaksanaan Pembangunan Perkotaan, adalah :

- a. Meningkatkan kemampuan pengelolaan kota, khususnya di bidang pembiayaan, pelayanan prasarana dan sarana umum, pelayanan publik (pendidikan, kesehatan, perumahan), dan pengelolaan tata ruang dan pertanahan.
- b. Mempersiapkan dan menyediakan peraturan perundang-undangan serta menegakkan hukum secara konsekwen dan konsisten.
- c. Meningkatkan kerjasama investasi dan pengelolaan prasarana dan sarana umum antara pemerintah dan swasta.
- d. Meningkatkan dan mengembangkan fungsi kota yang memenuhi standar lingkungan hidup.

2. Program

Untuk mewujudkan strategi kebijaksanaan Pembangunan Perkotaan, maka diperlukan program pembangunan di perkotaan yang merupakan pedoman bagi seluruh sektor terkait, yaitu :

- a. Peningkatan kapasitas pengelolaan kota, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan kota sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kota.
- b. Penanganan kerawanan sosial dan kemiskinan perkotaan, tujuannya adalah meningkatkan ketertiban, ketenangan, dan keamanan masyarakat perkotaan, meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap penyalahgunaan narkotik dan obat-obatan berbahaya, anak jalanan, tuna susila dan pengemis, dan meningkatkan pendapatan dan kemampuan masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.
- c. Pengembangan fungsi kota, ditujukan untuk memperkuat fungsi kota dalam rangka meningkatkan hubungan ekonomi antara kawasan perkotaan dengan kawasan terkait, meningkatkan ketersediaan jaringan pelayanan dalam kota, antara kota dan desa, dan antarwilayah.

- d. Pembenahan dan peningkatan sistem sanitasi perkotaan.
- e. Peningkatan kualitas lingkungan hidup di perkotaan.

E. PEMBANGUNAN PERMUKIMAN

1. Arah Kebijakan

Arah kebijakan dalam Pembangunan Permukiman yang dilakukan, adalah :

- a. Meningkatkan kemampuan pengelolaan pelayanan dan sarana permukiman di kawasan perkotaan dan perdesaan.
- b. Meningkatkan kerjasama investasi dan pengelolaan pelayanan prasarana dan sarana permukiman antara pemerintah, swasta dan masyarakat.
- c. Mendorong berkembangnya sistem penyediaan hunian yang layak, murah, dan terjangkau oleh masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah serta mengembangkan sistem subsidi hunian bagi masyarakat miskin.
- d. Mengendalikan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan perdesaan yang berlebihan.

2. Program

- a. Peningkatan sistem penyediaan dan perbaikan perumahan, tujuannya adalah untuk memantapkan penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui bantuan teknis dan pembiayaan, serta memantapkan sistem subsidi hunian bagi masyarakat miskin, agar masyarakat berpenghasilan rendah dan miskin mendapatkan hunian atau memiliki hunian yang layak huni.
- b. Peningkatan dan revitalisasi prasarana dan sarana permukiman, dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas jaringan prasarana dan sarana permukiman seperti air bersih, air limbah, sampah, drainase dan penanggulangan banjir, jaringan jalan dan pedestrian, pertamanan dan jalur hijau, serta lalu lintas dan transportasi umum di perkotaan dan perdesaan, sehingga masyarakat terpenuhi aksesnya terhadap pelayanan prasarana dan sarana permukiman yang mudah, murah, merata, tertib, aman, dengan harga yang terjangkau.

- c. Peningkatan dan revitalisasi dan pelestarian kawasan, dengan tujuan untuk meningkatkan pengelolaan, pemanfaatan, pemugaran dan pelestarian kawasan bersejarah dan permukiman tradisional, revitalisasi kawasan-kawasan strategis, dan meningkatkan pemanfaatan dan pelestarian lingkungan alam perdesaan khususnya pengelolaan sumberdaya air.
- d. Pengembangan pemukiman di *periphery* kota dan penumbuhan kegiatan perekonomian di perdesaan untuk menapis arus urbanisasi.

F. PENGEMBANGAN WILAYAH BARAT

1. Arah Kebijakan

Percepatan Pengembangan Wilayah Barat sebagai upaya mengatasi masalah perkembangan daerah yang lambat dilakukan dengan penataan program pengembangan wilayah secara terpadu yang perlu mendapatkan dukungan dari semua pihak.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Wilayah Barat, maka arah kebijakan yang ditempuh, antara lain adalah dengan meningkatkan prasarana wilayah seperti fasilitas jalan, pendidikan, kesehatan dan pemasaran. Kebijakan selanjutnya adalah meningkatkan kegiatan ekonomi kerakyatan seperti pengembangan industri rumah tangga, peternakan, dan upaya menggali potensi yang dapat meningkatkan perekonomian.

2. Program

Program pembangunan yang diprioritaskan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan Pengembangan Wilayah Barat antara lain, adalah :

- a. Pengembangan Kecamatan sebagai Pusat Pertumbuhan (KPP).
- b. Pengembangan usaha peternakan terutama kambing Peranakan Etawah (PE).
- c. Pengembangan pendidikan, pelatihan dan keterampilan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan sehingga mampu memanfaatkan peluang kerja dan peluang usaha dalam rangka meningkatkan produktivitas dan pendapatan.

- d. Peningkatan upaya kesehatan, terutama penanggulangan penyakit malaria.
- e. Pengembangan usaha kehutanan dan perkebunan agar masyarakat mampu memanfaatkan potensi hutan, terutama hutan rakyat.
- f. Penyediaan prasarana dan sarana air bersih untuk memenuhi kebutuhan penduduk terutama di bagian utara.
- g. Pembinaan industri kecil dan rumah tangga, seperti kerajinan dari rumput harmada, agel dan sebagainya.
- h. Pembangunan prasarana dan sarana perikanan laut, berupa dermaga, perahu dengan kapasitas lebih besar, *cold storage* dan sebagainya.
- i. Pengembangan pariwisata, terutama wisata alam.
- j. Pengendalian bencana alam terutama tanah longsor di bagian utara dan banjir di bagian selatan.

G. PENGEMBANGAN WILAYAH TENGAH

1. Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan Wilayah Tengah adalah menumbuhkan pusat-pusat kegiatan perekonomian, pembukaan aksesibilitas dengan daerah belakang (*hinterland*) dalam rangka mengembangkan Wilayah Tengah, ditempuh dengan melalui :

- a. Melaksanakan program pembangunan Kecamatan sebagai Pusat Pertumbuhan (KPP), yang diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang maju dalam bidang ekonomi dan sosial budaya yang didukung oleh peran aparatur yang handal dalam kondisi lingkungan yang tenteram.
- b. Mengembangkan kawasan sentra produksi, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mengedepankan penanganan pembangunan terpadu lintas wilayah, lintas sektor dan lintas pelaku.
- c. Mengembangkan kawasan strategis, bertujuan untuk mempercepat terbentuknya struktur dan pola pemanfaatan ruang di kawasan sesuai dengan rencana tata ruang.
- d. Melestarikan cagar budaya dan peninggalan sejarah

2. Program

Dengan arah kebijakan tersebut diatas, ditentukan prioritas pembangunan pada Pengembangan Wilayah Tengah, sebagai berikut :

- a. Penataan dan pengembangan kawasan kota, pengembangan *Central Bisnis District* (CBD), pengelolaan *Yogyakarta Exhibition Centre* (YEC), pembangunan *Islamic Centre*, pembangunan *outer ringroad*, wisata *Meeting-Incentive-Convention-Exhibition* (MICE), dan pengembangan perguruan tinggi.
- b. Program pembangunan yang terkait dengan kecamatan sebagai pusat pertumbuhan meliputi : peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, pengembangan industri kecil dan menengah, peningkatan kemampuan teknologi industri, pengembangan agribisnis, pengembangan kewirausahaan dan daya saing Pengusaha Kecil Menengah dan Koperasi (PKMK), pengembangan aksesibilitas prasarana jalan, peningkatan/ pembangunan transportasi jalan.
- c. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi meliputi 8 (delapan) sub kawasan dengan program-programnya, sebagai berikut :
 - 1) Sub Kawasan Yogyakarta dan beberapa kota satelit di sekitarnya, meliputi program peningkatan kualitas pelayanan publik, pelestarian dan pengembangan kebudayaan, pemasaran pariwisata, pengembangan wilayah strategis dan tumbuh cepat, peningkatan/ pembangunan transportasi jalan, penataan ruang, pengembangan prasarana dan sarana permukiman, pengembangan kewirausahaan dan daya saing Pengusaha Kecil Menengah dan Koperasi (PKMK), peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.
 - 2) Sub Kawasan Prambanan – Ratu Boko, meliputi program : pengembangan agribisnis, peningkatan ketahanan pangan, pengembangan produk wisata, dengan lokasi : Kecamatan Kalasan dan Prambanan Kabupaten Sleman.

- 3) Sub Kawasan Piyungan, meliputi program : pengembangan aksesibilitas prasarana jalan, pengembangan prasarana dan sarana permukiman, pengembangan kewirausahaan dan dayasaing PKMK, perluasan dan pengembangan kesempatan kerja, peningkatan/ pembangunan transportasi jalan, pengembangan industri kecil dan menengah, peningkatan kemampuan teknologi industri, dengan lokasi kecamatan Piyungan, Bantul.
- 4) Sub Kawasan Gamping – Sedayu, meliputi program : pengembangan perumahan, pengembangan prasarana dan sarana permukiman, pengembangan aksesibilitas prasarana jalan, peningkatan/ pengembangan transportasi jalan, pengembangan kewirausahaan dan dayasaing PKMK dengan lokasi meliputi Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman, dan Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul.
- 5) Sub Kawasan Tempel – Kaliurang, meliputi program : pengembangan agribisnis, pengembangan kewirausahaan dan dayasaing PKMK, pengembangan produk wisata, pengembangan aksesibilitas prasarana jalan, pengembangan industri kecil dan menengah dengan lokasi meliputi Kecamatan Turi, Pakem, dan Cangkringan Kabupaten Sleman.
- 6) Sub Kawasan Pajangan – Sentolo, meliputi program : pengembangan prasarana dan sarana permukiman, pengembangan kewirausahaan dan dayasaing PKMK, pengembangan industri kecil dan menengah, pengembangan produk wisata, peningkatan/pengembangan transportasi jalan, dengan lokasi Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul serta Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulonprogo.
- 7) Sub Kawasan Kretek – Srandakan, meliputi program : pengembangan agribisnis, pengembangan kewirausahaan dan dayasaing PKMK, pengembangan industri kecil dan menengah, pengembangan produk wisata dengan lokasi Kecamatan Kretek, Sanden dan Srandakan Kabupaten Bantul.

- 8) Sub Kawasan Imogiri – Pundong, meliputi program : pengembangan kewirausahaan dan daya saing PKMK, pengembangan industri kecil dan menengah, pengembangan produk wisata, pengembangan aksesibilitas prasarana jalan, dengan lokasi Kecamatan Imogiri dan Pundong, Kabupaten Bantul.
- d. Program Pengembangan Kawasan Strategis, meliputi : pengembangan wilayah strategis dan tumbuh cepat, pembangunan perkotaan, prasarana dan sarana permukiman, pemasaran wisata, pengembangan industri kecil dan menengah, pengembangan kewirausahaan dan daya saing PKMK. Adapun lokasi kegiatan adalah Kota Yogyakarta; Kecamatan Kasihan, Sewon, Banguntapan, di Bantul; Kecamatan Gamping, Mlati, Ngaglik, dan Depok di Sleman; Kota Sleman, Kota Wates, Kota Bantul, dan Kota Wonosari.
- e. Pengelolaan cagar budaya dan pelestarian peninggalan sejarah.

H. PENGEMBANGAN WILAYAH TIMUR

1. Arah Kebijakan

Secara umum kebijakan Pengembangan Wilayah Timur diarahkan untuk meningkatkan prasarana ekonomi kerakyatan dengan penekanan pada program pengelolaan air tanah. Pengembangan Wilayah Timur sesuai dengan karakteristiknya, dilakukan melalui peran sektoral, yaitu :

- a. Mengembangkan pemanfaatan sumberdaya air bawah tanah yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan air untuk keperluan rumah tangga baik di perdesaan maupun perkotaan dan untuk memenuhi kebutuhan pertanian lahan kering.
- b. Mengembangkan wilayah pesisir, baik untuk pariwisata, maupun budidaya usaha perikanan laut.
- c. Mengembangkan konsep hutan rakyat dan perkebunan rakyat.
- d. Mengembangkan penambangan rakyat yang mengacu kepada kelestarian dan keberlanjutan kemanfaatan sumberdaya alam.
- e. Memperluas dan meningkatkan jaringan jalan untuk membuka isolasi daerah.
- f. Mengadakan penelitian dan pengembangan kemanfaatan ekosistem karts.

2. Program

Program prioritas pembangunan untuk mendukung Pengembangan Wilayah Timur antara lain, adalah :

- a. Penyediaan air baku, pengembangan kecamatan sebagai pusat pertumbuhan, peternakan, industri kecil/rumah tangga.
- b. Penyediaan prasarana perikanan laut dan pariwisata.
- c. Pelestarian hutan lindung dan pengembangan konsep hutan rakyat dan perkebunan rakyat.
- d. Pengembangan peternakan yang dipadukan dengan pertanian lahan kering.
- e. Pengendalian kegiatan penambangan rakyat dengan penekanan pada pelestarian lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan.
- f. Pengembangan agribisnis dan agroindustri dengan budidaya pertanian lahan kering.
- g. Pelaksanaan penelitian mengenai karst.

I. PENGEMBANGAN WILAYAH PESISIR

1. Arah Kebijakan

Kebijakan pembangunan Wilayah Pesisir diarahkan untuk mendukung pertumbuhan dan pemulihan ekonomi daerah. Untuk mewujudkan kebijakan tersebut, maka arah pengembangan Kawasan Pesisir Selatan tetap harus secara terencana dan memperhatikan arahan sebagaimana ditegaskan dalam Rencana Detail Tata Ruang Kawasan. Selain itu perlu menerapkan pola pembangunan berwawasan lingkungan yang berkesinambungan dan berkelanjutan dengan memperhatikan keharmonisan spasial, pemanfaatan sumberdaya alam secara optimal, perencanaan pembuangan limbah padat dan cair agar sesuai dengan kapasitas absorpsi daya dukung lingkungan, perencanaan pembangunan prasarana dan sarana sesuai dengan karakteristik serta dinamika ekosistem pesisir.

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, arah Pengembangan Kawasan Pesisir Selatan adalah, sebagai berikut :

- a. Kawasan Timur daerah pantai untuk pengembangan pariwisata, pelabuhan pendaratan ikan (di Pantai Sadeng), teknologi energi gelombang, perikanan lepas pantai dan air bersih dari aliran sungai bawah tanah.
- b. Kawasan Tengah diarahkan untuk kawasan lindung sempadan pantai dan kawasan wisata alam yang pada perkembangan terakhir akan dimanfaatkan untuk pembangunan prasarana pendaratan ikan (di Pandansimo), perikanan ikan laut, pembibitan udang, pariwisata pantai dan budaya (Parangtritis dan Parangkusumo), agribisnis, penggemukan sapi potong, penyediaan air untuk pertanian lahan kering dengan konsep sumur renteng.
- c. Kawasan Barat diarahkan untuk pengembangan prasarana dan sarana kelautan sesuai dengan hasil studi kelayakan, perikanan laut, pariwisata pantai, pariwisata *ritual*, agribisnis dan teknologi energi angin.

2. Program

Program prioritas pembangunan Wilayah Pesisir adalah meliputi wisata alam dan wisata budaya, perikanan, pertanian lahan kering, pembangunan prasarana perikanan laut. Secara rinci program pembangunan tersebut, adalah :

- a. Penyusunan Tata Ruang Wilayah Pesisir.
- b. Pengembangan SDM terutama agar mampu mengenali, menggali dan memanfaatkan potensi sumberdaya alam setempat.
- c. Pengembangan pertanian terpadu berbasis agribisnis di lahan pantai dengan penanaman penahan angin (*windbarrier*), budidaya tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dengan sistem kandang kelompok, dikaitkan dengan program pengentasan kemiskinan.
- d. Pengembangan budidaya perikanan laut dan tambak serta pembangunan tempat pelelangan ikan.
- e. Penyelenggaraan promosi untuk menarik penanam modal, turis maupun pedagang.
- f. Penelitian sumberdaya kelautan dan pengembangan teknologi tepat guna bidang kelautan dan pantai.
- g. Pengembangan pariwisata ekosistem, pariwisata *ritual* dan pariwisata minat khusus.
- h. Pembangunan prasarana dan sarana pelestarian pantai dan muara sungai.

BAB VII

P E N U T U P

1. Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2001 – 2005 ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan memuat kebijaksanaan dan pokok-pokok program pembangunan yang bersifat strategis untuk menjadi acuan penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program pembangunan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bagi pengelola program pembangunan baik aparat pemerintah maupun masyarakat dan pelaku sektor swasta di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk mewujudkan terciptanya visi dan misi pembangunan daerah, maka penjabaran Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) secara operasional dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) yang selanjutnya dijabarkan ke dalam bentuk program-program pembangunan yang kongkrit, terarah dan transparan dalam usulan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
3. Selama belum ditetapkan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, maka untuk menjaga dan memelihara tercapainya kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, pemerintah dapat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun sebelumnya.
4. Berhasilnya pelaksanaan pembangunan, tergantung dari peran aktif, sikap mental, tekad, semangat dan disiplin serta ketaatan terhadap peraturan perundangan yang berlaku dari semua pihak baik pemerintah (lembaga eksekutif), lembaga legislatif, lembaga peradilan dan masyarakat luas serta dunia usaha.

**GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

HAMENGKU BUWONO X